

# YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD



## PERAN KRITIS JAMMER DALAM OPERASI MILITER MODERN

ISSN 2086-9320



9772086932001

EDISI DESEMBER 2023





**BRIGJEN TNI KRISTOMEI SIANTURI, S.Sos., M.Si.  
(KADISPENAD)**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya Tim redaksi dapat menerbitkan Jurnal Yudhagama Volume 43 Nomor IV Edisi Desember 2023. Jurnal ini menyajikan beberapa tulisan dari kalangan Militer yang berhasil dihimpun oleh Tim redaksi, baik dari para Pati, Pamen dan Pama TNI AD yang bertugas di Satuan jajaran TNI AD.

Tema dan isi tulisan yang ditampilkan dalam Jurnal ini menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang diemban para penulis, sehingga semakin menarik untuk dibaca. Para pembaca dimana pun berada, terutama prajurit dan PNS TNI AD serta keluarga dapat mengambil manfaat dari tulisan-tulisan yang ada ini untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan.

Disadari bahwa dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan, harapan kami para pembaca sekalian dapat memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan Jurnal Yudhagama edisi berikutnya, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca.

## **SUSUNAN REDAKSI**

### **Penanggung Jawab**

Brigjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si.

### **Pemimpin Redaksi**

Kolonel Arh Sudrajat, S.I.P., M.I.P.

### **Sekretaris Redaksi**

Letkol Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd.

### **Koordinator Liputan**

Letkol Caj Triyono, S.I.P.

### **Redaktur Bahasa & Editor**

Mayor Caj (K) Besarrah Septiana M., S.S.

### **Redaktur Pracetak**

PNS Listin

### **Fotografer**

Serma Taufik Armanto

### **Desain Grafis**

Sertu (K) Intan Indah Permatasari

## **YUDHAGAMA**

**MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD**

### **Alamat Redaksi**

Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat  
Jl. Veteran No. 5, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300

### **Alamat Email**

palaganyudhagama@gmail.com,  
dispenad@mabesad.mil.id

### **Website**

<http://www.tniad.mil.id>

### **Youtube**

TNI Angkatan Darat

### **Facebook**

<https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI>

### **Twitter**

[https://twitter.com/TNI\\_AD\\_Official](https://twitter.com/TNI_AD_Official)

### **Instagram**

[https://www.instagram.com/tni\\_angkatan\\_darat](https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat)

# Daftar Isi

---

- 06** **PERAN KRITIS JAMMER DALAM OPERASI MILITER MODERN**  
Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo
- 12** **SISTEM PERTAHANAN SIBER**  
Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie
- 17** **INTEGRASI APLIKASI SISTEM INFORMASI TNI AD**  
Brigjen TNI Nugroho Septijantono, S.I.P.
- 21** **FUNGSI STANDARDISASI DAN KELAIKAN ALUTSISTA TNI AD**  
Brigjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si.
- 25** **TUGAS DAN FUNGSI DITTOPAD**  
Brigjen TNI Ir. Adik Sugianto
- 28** **PENERBAD MODERN PROFESIONAL DAN ANDAL**  
Mayjen TNI Toto Nugroho, S.I.P., M.Si.

**34**

**PERAN SATUAN KOREM 033/WIRA PRATAMA**

Brigjen TNI Jimmy Watuseke

**40**

**AKUNTABILITAS DUKUNGAN LOGISTIK BEKANG DALAM MEWUJUDKAN KESIAPAN OPERASIONAL TNI AD**

Letkol Cba (K) Edza Ferasari Winda, S.E., M.M.

**45**

**PEMBINAAN SATUAN DAN PRESTASI**

Letkol Inf Benu Supriyantoko, S.H.

**50**

**PERUBAHAN NOMENKLATUR ASPAM KASAD MENJADI ASINTEL KASAD**

Mayor Kav Rollan Djunaedi, S.H., M.I.P.

**56**

**SATUAN PUSDIKLATPASSUS KOPASSUS TNI AD**

Mayor Inf Wirahady Harahap

**64**

**PERAN SATGAS YONIF PR 305/TENGGORAK**

Letda Inf Muhammad Kevin Wirasena, S.Tr (Han)



OLEH : MAYJEN TNI KUNTO ARIEF WIBOWO  
(WADAN KODIKLATAD)

# PERAN KRITIS JAMMER DALAM OPERASI MILITER MODERN

Akan tetapi kecanggihan teknologi ternyata juga menciptakan ancaman tersendiri, karena semua perangkat teknologi komunikasi dan navigasi bertumpu pada kekuatan satelit dan sinyal frekuensi radio (RF). Akibatnya, dalam konteks pertempuran militer, sinyal dan frekuensi inilah yang kemudian diserang pada tahap pertama. Keampuhan serangan yang kemudian mematikan sistem komunikasi musuh akan jadi titik awal keberhasilan sebuah operasi militer. Mekanisme pengacauan sistem komunikasi inilah yang disebut sebagai *Jammer* Militer.

**D**i era pertempuran modern, penggunaan kemajuan teknologi adalah sesuatu yang wajib, terutama sekali teknologi komunikasi dan navigasi. Pergerakan pasukan, komunikasi antar satuan, suplai logistik, pelacakan titik sentral musuh, termasuk kekuatan internal pasukan, banyak bergantung pada kekuatan teknologi. Pemanfaatan teknologi *Integrated Visual Augmentation System (IVAS)* oleh AS dalam berbagai operasi militer adalah salah satu buktinya (Lasserre 2022).<sup>1</sup>

Melalui perangkat teknologi, sebuah pasukan bisa melacak dan mengetahui posisi musuh, komunikasi yang berlangsung termasuk kekuatan pasukan, cukup dengan memanfaatkan sebuah layar monitor. Akurasi titik koordinat juga bisa ditampilkan (Skokowski et al. 2022).<sup>2</sup> Teknologi GPS sudah menunjukkan bagaimana potret sebuah wilayah bisa ditampilkan dari jarak jauh.

*Jammer* militer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mengganggu atau memblokir sinyal elektronik dalam suatu area tertentu (Sharma, Sarma & Mastorakis 2020).<sup>3</sup> Melalui aktifitas *jamming*, pengacauan komunikasi hingga merusak sistem navigasi sangat mungkin dilakukan. Akibatnya pasukan yang melakukan *jamming* bisa mendominasi medan elektronik dan mengambil keuntungan strategis. Sistem komunikasi musuh bisa dilumpuhkan sekaligus keberadaan pasukan juga bisa dikaburkan. Akan terjadi kondisi seperti orang buta yang maju ke medan tempur. Pasukan musuh tak akan bisa melihat apapun, dan itu adalah sebuah keuntungan strategis bagi pasukan yang melakukan *jamming*.

<sup>1</sup> Lasserre, Sandrine. 2022. "4 Use Cases for Virtual Reality in the Military and Defense Industry." Techviz. Retrieved (<https://blog.techviz.net/4-use-cases-for-virtual-reality-in-the-military-and-defense-industry>).

<sup>2</sup> Skokowski, Pawel, Jan M. Kelner, Krzysztof Malon, Krzysztof Maslanka, Agnius Birutis, Miguel A. Vazquez, Souradip Saha, Warren Low, Agnieszka Czapiewski, Jaroslaw Magiera, Piotr Rajchowski, and Slawomir Ambroziak. 2022. "Jamming and Jamming Mitigation for Selected 5G Military Scenarios." *Procedia Computer Science* 205(September):258–67. doi: 10.1016/j.procs.2022.09.027.

<sup>3</sup> Sharma, Purabi, Kandarpa Kumar Sarma, and Nikos E. Mastorakis. 2020. "Artificial Intelligence Aided Electronic Warfare Systems- Recent Trends and Evolving Applications." *IEEE Access* 8(December 2020):224761–80. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3044453.

Pada konteks inilah terlihat suatu kondisi penting serta peran signifikan dari *jammer* pada dunia militer, karena sistem komunikasi dan navigasi adalah hal yang paling krusial dalam sebuah operasi militer. Apalagi pada perkembangan sekarang ini, fenomena peperangan militer bukan lagi perang konvensional, tapi sudah menjadi sebuah peperangan elektronik (*electronic warfare*). Kemenangan sebuah peperangan ditentukan bagaimana pemanfaatan perangkat elektronik bisa dimaksimalkan (Dahm 2020).<sup>4</sup> Tulisan ini akan mendalami bagaimana peran kritis *jammer* dalam konteks militer, khususnya di Indonesia. Termasuk rekomendasi hal-hal apa yang harus dilakukan dalam pemanfaatan *jammer* di militer Indonesia.

## Sejarah Jammer

Ditilik dari sejarah, pemanfaatan *jammer* memang diawali dan banyak berkembang di dunia militer. Bahkan hingga saat ini, di banyak negara, *jammer* hanya diizinkan pemakaiannya oleh militer, dilarang penggunaan oleh sipil (Singh et al. 2019).<sup>5</sup> Hal ini disebabkan karena penggunaan *jammer* bisa mengacaukan sistem komunikasi pihak lain.



Saat perang dunia II berlangsung, *jammer* sudah mulai diterapkan. Seperti pengacauan sistem navigasi angkutan udara Jerman oleh Inggris, penaburan

*Chaff* secara besar-besaran oleh Inggris ke Hamburg Jerman tahun 1943. Begitu juga saat terjadi perang Malvinas antara Inggris dengan Argentina, dimana rudal *Exocet* Argentina dibingungkan oleh *chaff* yang ditaburkan Inggris. Hal yang sama juga terjadi saat konflik Mesir dengan Israel, perang Vietnam, dan bahkan saat perang teluk antara AS dengan Irak (Djaelani and Rustamaji n.d.).<sup>6</sup>

Memang, perangkat *jammer* pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh militer. Hal ini berawal dari tujuan fundamental menolak segala pengiriman informasi dari pengirim (komando taktis) ke penerima (tentara), dan orang-orang terkait. Sejarah menunjukkan *jammer* telah digunakan sejak jaman perang dunia kedua, *jammer* digunakan untuk mengganggu komunikasi musuh pada saat perang (Triyono, P, and Nashiruddin 2015).<sup>7</sup>

Pada tahap awal pengembangannya, *jammer* militer umumnya difokuskan pada pengacauan sinyal radio frekuensi (RF) tradisional. Namun, dengan cepatnya perkembangan teknologi, *jammer* modern mampu menghadapi berbagai frekuensi dan jenis sinyal, termasuk sistem navigasi satelit (GPS), sistem komunikasi nirkabel, dan bahkan jaringan komputer.

Perkembangan *Jammer* mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang ini pemakaian *jammer* sudah meluas, tidak lagi hanya kalangan militer, walaupun sebetulnya pemakaian di warga sipil tidak dibolehkan. Penyebabnya karena *jammer* bisa dilakukan melalui perangkat *smartphone*. Ketersediaan perangkat elektronik dan canggihnya teknologi telekomunikasi memungkinkan banyak pihak menggunakan *jammer*. Seperti kasus hilangnya sinyal telepon seluler dalam acara tertentu. Orang-orang yang

<sup>4</sup>Dahm, J. Michael. 2020. *Electronic Warfare and Signals Intelligence*. London: John Hopkins Applied Physics Laboratory.<sup>2</sup>Skokowski, Pawel, Jan M.

<sup>5</sup>Singh, Ankit, Ashutosh Birole, Shivam Kale, Sangeet Debnath, and J. M. Bhattad. 2019. "Signal Jammer in Military Operations." *International Research Journal of Engineering and Technology* 06(03):4412-18.

<sup>6</sup>Djaelani, Elan, and Rustamaji. n.d. "Pengenal Peperangan Elektronika ( Electronic Warfare )." *Media Neliti*, 1-5.

<sup>7</sup>Triyono, Eddy, Imelda Erawati Supono P, and Muhammad Nashiruddin. 2015. "Jammer Untuk Dual Band GSM Dan CDMA." *JTET (Jurnal Teknik Elektro Terapan) Polines* 13(2):1-9.

berada dalam radius *jammer* tidak akan bisa berkomunikasi dengan pihak lain melalui telepon seluler. Oleh karena itu lah *jammer* kemudian dilarang digunakan oleh publik, kecuali untuk kepentingan militer atau yang diizinkan.

## Fungsi dan Kegunaan *Jammer* Militer

Dengan karakteristik *jammer* sebagai pengacau sinyal-sinyal pada sistem komunikasi, maka *jammer* tentu saja memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri. Terlepas dari sisi positif dan negatifnya, *jammer* jelas berguna untuk kelancaran tugas-tugas kemiliteran. Beberapa kegunaan dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. **Pertahanan Elektronik.** *Jammer* digunakan dalam pertahanan militer untuk melindungi sistem komunikasi dan navigasi dari serangan musuh. *Jammer* dapat mengacaukan atau memblokir sinyal-sinyal yang dapat digunakan oleh musuh untuk melacak atau menghancurkan peralatan militer.

2. **Gangguan Komunikasi Musuh.** Dalam konteks militer, *jammer* dapat digunakan untuk mengganggu komunikasi musuh, mencegah pertukaran informasi antar pasukan lawan. Hal ini dapat menciptakan kebingungan, mengurangi koordinasi, dan memberikan keuntungan taktis.

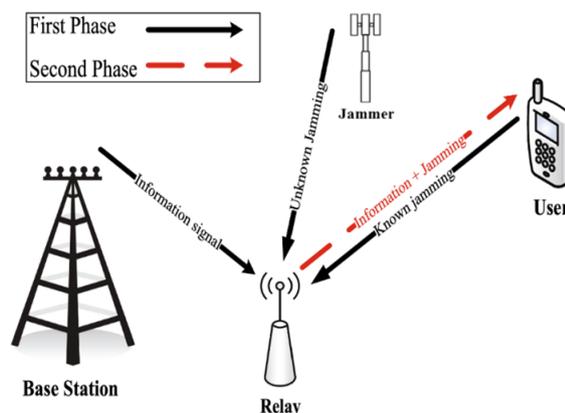
3. **Gangguan Sistem Navigasi.** *Jammer* dapat memblokir sinyal-sinyal GPS atau sistem navigasi satelit lainnya. Ini dapat menghambat kemampuan musuh untuk menentukan lokasi mereka secara akurat, yang penting dalam operasi militer.

4. **Pencegahan Penggunaan Drone.** *Jammer* dapat digunakan untuk memblokir sinyal kontrol dari dan ke drone. Hal ini dapat digunakan untuk mencegah penggunaan drone yang tidak

diinginkan, seperti *drone* yang dimiliki oleh pihak musuh atau pihak yang tidak sah.

5. **Pertahanan Terhadap Pencurian Informasi.** *Jammer* dapat digunakan untuk melindungi informasi sensitif dari perekaman atau transmisi tidak sah. Misalnya, mereka dapat digunakan untuk melindungi ruang konferensi atau area lainnya dari penyadapan elektronik.

Melihat pada fungsi-fungsi di atas, maka *jammer* jelas tidak bisa disalahgunakan. Kesalahan pemakaian *jammer* atau digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, akan memberikan dampak signifikan. Ini perlu diwaspadai karena penggunaan *jammer* tidaklah terlalu rumit. Secara sederhana gambaran pemakaian *jammer* bisa dilihat dari gambar berikut.



Gambar 1. Mekanisme kerja *Jammer*

Tampak bahwa *jammer* masuk ke sistem relay dan kemudian ini akan memecah dan bahkan memblokir sinyal yang akan diteruskan ke pengguna. Sumber informasi yang berasal dari base station akan diblok oleh sinyal yang dikirimkan oleh *jammer*. Akibatnya, pengguna tidak akan bisa menerima informasi apapun.

## Peran Kritis *Jammer* dalam Operasi Militer Modern

Dalam konteks peperangan militer modern, pertahanan secara elektronik adalah hal terpenting. *Jammer* tidak hanya berfungsi sebagai pengacak dan pengacu sinyal musuh tapi juga bisa berguna untuk mempertahankan diri dari serangan elektronik pihak lawan. Oleh karena itu, beberapa peran penting dari *jammer* dalam konteks operasi militer modern adalah:

**Pertama**, sebagai proteksi dalam pertahanan terhadap ancaman serangan elektronik musuh. Dengan mengidentifikasi dan merespons terhadap ancaman sinyal musuh, *jammer* memungkinkan pasukan untuk mempertahankan integritas sistem komunikasi dan navigasi mereka sendiri. Ini tidak hanya melibatkan pengacauan terhadap sinyal musuh, tetapi juga kemampuan untuk mendeteksi dan melacak sumber-sumber sinyal tersebut.

Pertahanan elektronik modern bergantung pada kecepatan dan ketepatan respons terhadap ancaman. *Jammer* militer, yang dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal canggih, mampu mendeteksi dan menanggapi ancaman dalam hitungan detik. Kemampuan ini memberikan keunggulan yang signifikan dalam mempertahankan sistem komunikasi dan navigasi militer dari serangan elektronik.

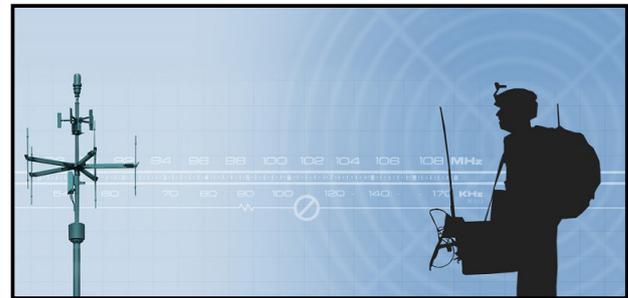
**Kedua**, *Jammer* militer menjadi senjata yang sangat efektif dalam operasi offensif. Dengan mengacaukan sistem komunikasi dan navigasi musuh, pasukan yang menggunakan *jammer* dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di antara pasukan lawan. Ini memungkinkan pelaksanaan serangan atau penarikan pasukan dengan efektif, sekaligus mengurangi kemampuan musuh untuk merespons dengan cepat.

**Ketiga**, *Jammer* juga dapat digunakan untuk menggagalkan pergerakan dan koordinasi musuh dalam

medan pertempuran. Dengan memblokir sinyal GPS, pasukan yang menggunakan *jammer* dapat membuat pasukan musuh kehilangan kemampuan navigasi presisi, menghasilkan ketidakpastian dalam pergerakan pasukan musuh dan memudahkan penyerangan.

**Keempat**, tumbuhnya rasa percaya diri dan rasa keterlindungan dari para prajurit di medan pertempuran. Dengan adanya pengetahuan yang cukup dan memadai mengenai kekuatan musuh, keyakinan dari prajurit di lapangan akan meningkat. *Jammer* bisa diandalkan untuk melacak sejumlah informasi yang berkaitan dengan peperangan.

## Tantangan Media Komunikasi Militer di Indonesia



Meskipun memiliki peran yang vital, media komunikasi militer khususnya pemakaian *Jammer* di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dicermati untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan dalam mendukung tugas-tugas keamanan nasional.

**Pertama, keterbatasan dalam teknologi.** Pemeliharaan sistem komunikasi dan perangkat lunak yang terus berkembang memerlukan investasi yang berkelanjutan. Peningkatan teknologi terkini menjadi penting untuk menghadapi ancaman *cyber warfare*, serta memastikan kelancaran dan keamanan komunikasi militer. Teknologi *jammer* memang tidak terlalu tinggi dalam nilai investasi, tetapi teknologi untuk anti *jammer*, butuh pembiayaan besar. Pengadaan dan perawatan

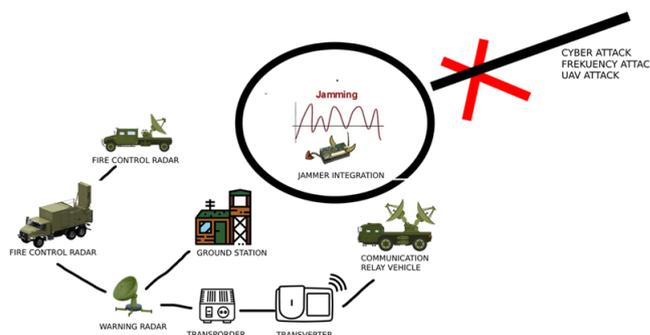
perangkat harus berkelanjutan dan update terhadap teknologi. Investasi khusus harus diarahkan pada pencapaian ini.

Kedua, perbedaan teknologi atau protokol komunikasi antara cabang-cabang militer atau dengan mitra internasional. Harmonisasi dan integrasi sistem menjadi penting untuk memastikan kolaborasi yang efisien dalam situasi darurat atau konflik. Media komunikasi militer di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan koordinasi antara cabang-cabang militer yang berbeda. Kekurangan integrasi yang efektif dapat mempengaruhi pertukaran informasi dan rencana taktis (Singh et al. 2019).<sup>8</sup> Tantangan muncul ketika informasi sensitif harus disampaikan dengan hati-hati untuk menghindari kepanikan atau pengungkapan yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Ketiga, ketergantungan pada satelit dan infrastruktur komunikasi dapat menjadi poin kelemahan. Gangguan atau serangan terhadap infrastruktur ini dapat memotong saluran komunikasi militer (Sharma et al. 2020).<sup>9</sup> Kemampuan dalam pemanfaatan teknologi, termasuk jammer, akan diikuti pula oleh kemampuan pihak lawan dalam menggunakan teknologi penangkal atau peretas. Teknologi komunikasi berpusat pada satelit. Keterlambatan dalam antisipasi teknologi seperti ini akan menjadikan Indonesia justru jadi bulan-bulanan ketika pihak lain sudah mampu lebih jauh menciptakan atau mengadopsi teknologi yang lebih maju. Jammer dapat memblokir atau mengacaukan sinyal komunikasi dan navigasi, mengakibatkan hambatan serius bagi operasi militer yang bergantung pada teknologi tersebut.

Keempat, keseimbangan antara keamanan dan transparansi. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi, namun, dalam beberapa kasus,

kepentingan keamanan dapat memerlukan pembatasan informasi tertentu. Secara keseluruhan, media komunikasi militer di Indonesia beroperasi di lingkungan yang dinamis dan penuh tekanan. Upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan teknologi, keamanan siber, koordinasi antar cabang, dan kesadaran akan tantangan keamanan informasi merupakan kunci untuk menjaga integritas dan efektivitas media komunikasi militer di masa depan.



## Rekomendasi Penguatan

Terhadap beberapa penjelasan di atas, tampak bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan dan disempurnakan dalam konteks pemanfaatan jammer di dunia militer. Peran kritis jammer sudah meyakinkan kita bahwa teknologi ini punya peran penting dan strategis. Beberapa hal bisa direkomendasikan untuk penguatan dan optimalisasi pemanfaatan jammer.

Pertama, di level top management dan pengambil kebijakan, harus menetapkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah bagian integral yang tak terpisahkan dalam implementasi sishannas. Melalui ini akan memudahkan turunan kebijakan ke level menengah dan bawah untuk eksekusi, baik soal aspek pendidikan, pendanaan, sampai pengadaan. Kemauan politik menjadi kata kunci berjalannya

implementasi pemutakhiran teknologi informasi dalam pertahanan nasional.

**Kedua**, pihak terkait dalam produksi teknologi informasi dan komunikasi harus bisa menurunkan kebijakan manajemen puncak dalam kegiatannya. Dengan kata lain, jika selama ini teknologi informasi, termasuk *jammer* banyak bergantung dari pengadaan pihak luar, sudah saatnya Indonesia menerapkan kebijakan mampu berdiri sendiri. Inovasi-inovasi harus terus dilakukan dan kemudian mendapatkan fasilitasi dari negara. Kebijakan industri pertahanan bisa jadi landasan dalam merancang dan menciptakan produk-produk baru yang sejatinya bisa dipakai secara internal ataupun eksternal. Tanggung jawab terletak pada berbagai Badan Litbang, baik dari unsur militer ataupun sipil. Seberapa kuat inovasi diciptakan dan seberapa besar memiliki nilai kemanfaatan bagi pemakai dalam negeri akan jadi pertanyaan.

**Ketiga**, perlu ada upaya untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara angkatan bersenjata ataupun lembaga non militer. Ini untuk mengatasi masalah perbedaan persepsi dan sudut pandang dalam melihat teknologi dan kepentingan pertahanan. Asumsi bahwa teknologi *jammer* hanya boleh digunakan untuk keperluan militer, harus dilihat dari sudut pandang sistem pertahanan nasional, bukan kepentingan lembaga semata apalagi individu.

**Keempat**, pengembangan sistem alternatif dan cadangan menjadi penting untuk menjaga kelancaran komunikasi. Kesadaran keamanan informasi dan pelatihan bagi personel militer menjadi aspek krusial untuk mencegah kebocoran informasi atau serangan siber. Tantangan dalam menghasilkan budaya keamanan informasi yang kuat memerlukan investasi dalam pelatihan dan pendidikan bagi personel militer.

**Kelima**, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas dengan pihak non militer, bahwa dalam konteks pertahanan

nasional, apapun dibolehkan untuk dilakukan, sepanjang akan berpengaruh kuat pada sistem pertahanan. Ini mengacu pada tantangan keterbukaan informasi publik, dimana publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi sedetil mungkin, tetapi pihak militer dengan alasan pertahanan nasional, harus juga melakukan pembatasan-pembatasan. Tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, tetapi militer harus tahu hal itu.

**Keenam**, lembaga-lembaga pendidikan militer harus senantiasa menyesuaikan kurikulum pembelajarannya dengan menekankan kesadaran tentang *electronic warfare* adalah sebuah keniscayaan. Ada materi khusus yang akan membentuk pola berpikir prajurit sehingga tidak ada kegagapan dalam melihat dan memakai teknologi terbaru. Lembaga semacam Kodiklat menanamkan kurikulum berbasis Teknologi Informasi yang kekinian sebagai sebuah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi.

**Ketujuh**, lembaga pendidikan tinggi non militer juga harus dikondisikan agar melek dan paham bahwa konteks pertahanan negara saat ini bukan lagi pertahanan secara konvensional, tapi sudah berbasis teknologi militer. Lembaga tersebut juga berperan dalam menunjukkan kiprah nyata untuk penguatan teknologi informasi. Hasil dari pekerjaan lembaga pendidikan tinggi bisa dimaksimalkan untuk menopang pertahanan nasional, apapun bentuk dan produk yang dihasilkan

Demikian tulisan tentang Peran Kritis *Jammer* dalam Operasi Militer Modern ini dibuat. Semoga dapat menjadi pemacu inovasi prajurit dan satuan demi kemajuan TNI AD yang kita banggakan bersama.

# SISTEM PERTAHANAN SIBER

## (STRATEGI PUSSANSIAD DALAM MENGHADAPI ANCAMAN SIBER)

### Perkembangan Lingkungan Strategis

**D**inamika perkembangan lingkungan strategis di kawasan nasional, regional maupun global telah menghadirkan peluang dan ancaman dalam pertahanan negara, termasuk ancaman di bidang siber. Berdasarkan hal tersebut, maka Pussansiad sebagai Badan Pelaksana Pusat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan personel serta fungsi Sandi dan Siber dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat sedang menyusun sebuah strategi untuk kemudian menjadi sebuah pedoman pertahanan siber yang saat ini sudah memasuki era Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*) yaitu masyarakat yang berbasis digital atau masyarakat yang hidup di ruang digital ketika digitalisasi sudah masuk ke semua aspek kehidupan. Dengan demikian merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari bila sektor pertahanan dan keamanan juga sudah masuk ke ranah digitalisasi.

Sebelumnya dalam era paling awal, manusia berperang dalam era



Danpussansiad memberikan arahan kepada personel Satlak Kalsiber dalam kegiatan di Security Operation Center (SOC)



**OLEH : BRIGJEN TNI IROTH SONNY EDHIE  
(DANPUSSANSIAD)**

*man to man* yaitu manusia dengan manusia berperang berhadapan. Daya tempur relatif ditentukan oleh manusia yang memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak. Kemudian era generasi taktik dan manuver, ketika perang sudah menggunakan taktik dan strategi operasional dalam bermanuver untuk memenangkan peperangan. Kemudian, era perang generasi ketiga di mana manusia sudah berbasis kepada teknologi militer. Contohnya pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Selanjutnya era perang generasi keempat di mana perang ini merupakan perang asimetris, perang yang tidak simetris atau perang non-konvensional. Dalam perang ini dimainkan oleh aktor negara dengan aktor non-negara. Perang konvensional adalah perang antara negara dengan negara, namun perang perang non-konvensional memadukan



Pussansiad aktif dalam *upskilling* para personelnya dengan melaksanakan *Subject Matter Expert Exchange* dengan negara-negara lain

berbagai unsur perang, antara aktor negara dengan aktor non-negara. Aktor non negara bersifat *interstate actor* yang sudah terorganisir seperti serangan teroris terhadap Gedung WTC tahun 2001. Contoh lainnya dapat kita sebut adalah perang antara Amerika Serikat melawan ISIS, perang melawan institusi non-negara. Dalam perang ini konsep perangnya juga tidak konvensional seperti menggunakan kavaleri, tank dan sebagainya, tetapi melawan organisasi-organisasi internasional, yang merupakan kejahatan *transnational crime*.

Saat ini adalah perang generasi kelima yaitu perang siber dan informasi. Dalam perang ini informasi hal yang utama, sementara siber merupakan media atau theaternya. Saat ini sudah terbentuk theater perang baru yang disebut dengan Theater Perang Siber, melengkapi empat theater perang yang sudah ada, yaitu Theater Perang Darat, Theater Perang Laut, Theater Perang Udara dan Theater Perang Ruang Angkasa. Keunikan dari Theater Perang Siber ini adalah karena keempat theater perang lainnya yang telah disebutkan di atas, berada di dalam ruang siber dengan konsep *interoperability* dan *interconnectivity* yang terhubung

menjadi sebuah kekuatan informasi. Dengan terkoneksi ruang siber dengan keempat theater perang lainnya akan mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat sistem komando dan kendali. Sebagai contoh ketika sebuah kapal musuh yang masuk dari wilayah utara negara Indonesia, saat tertangkap oleh radar satelit di theater ruang angkasa langsung diinformasikan ke Ruang Puskodal Panglima, seketika Panglima dapat menggerakkan ruang udara dengan menggunakan *touch screen* dari layar *smart screen* serta memerintahkan kekuatan udara dari pangkalan udara di Pontianak, lalu kekuatan laut dari Lanal di Belawan, serta kekuatan darat disiapkan di Natuna untuk menahannya. Hal ini merupakan kekuatan pertahanan siber tersebut dari sisi real time, akurasi dan kecepatan.

Sebaliknya, bila TNI tidak punya kekuatan ruang siber yang terkoneksi (manual), maka bila ada kapal musuh masuk yang tertangkap radar kemudian dipantau dengan binokular, dan kemudian dilaporkan menggunakan faksimili ke Puskodal, maka kapal musuh sudah jauh masuk ke wilayah negara Indonesia. Ini salah satu contoh yang

dimaksud sistem komando dan kendali sebagai peluang untuk kekuatan elemen tempur dan sebagai kekuatan sistem informasi intelijen karena merupakan perpaduan dari intelijen darat, laut, udara dan ruang angkasa itu sebagai sebuah informasi intelijen yang sangat penting, karena inti dari informasi intelijen adalah untuk mencegah keraguan pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan.

Namun di sisi yang lain siber dapat menimbulkan ancaman. Ancaman siber mencakup dua macam, yaitu ancaman yang bersifat teknis merusak critical infrastructure atau aset-aset kritis TNI Angkatan Darat dalam hal ini termasuk sisi informasi dan sistem-sistem pelayanan berbasis digital. Maka tidak heran bila muncul serangan menggunakan virus-virus *malware*, *ransomware*, *DDoS Attack*, *Phising* dan lainnya yang harus direspons dengan sebuah konsep operasi dan sebuah postur yang harus dibangun. Kemudian, ancaman siber yang bersifat non-fisik atau *cognitive warfare* lebih bersifat menyerang atau sering disebut dengan *information warfare*. Yang diserang dalam hal ini adalah pikiran prajurit dan keluarganya, yaitu dengan perang informasi, perang *mindset*, perang persepsi melalui serangan-serangan hoaks, berita-berita bohong, disinformasi dan lainnya.

## Pembahasan Strategi Pussansiad

Konsep operasi siber sama halnya dengan konsep operasi perang konvensional yaitu melalui tahap penangkalan atau pencegahan, tahap penindakan dan tahap pemulihan. Semua tahapan ini harus dibangun dengan penguatan postur yaitu kekuatan, kemampuan dan gelar. Kekuatan bersifat fisik yang terlihat, sementara kemampuan bersifat Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya adalah Aspek Gelar yaitu Gelar Terpusat dan Gelar Tersebar. Seperti halnya Pussansiad, Gelar Terpusat sebagai Balakpus di bawah Kasad, sedangkan Gelar Tersebar adalah kekuatan TNI AD di kewilayahan-kewilayahan yang berbasis kompartemen strategis dengan konsep penguatan Kodam-Kodam. Kodam harus diperkuat dengan kekuatan siber. Sebagai kompartemen strategis, setiap kodam harus mampu melaksanakan operasi berdiri sendiri. Konsepnya adalah sebagai miniatur TNI AD di wilayah.

Menyikapi hal tersebut di atas, maka diperlukan strategi Pussansiad yang berbasis konsep operasi dan postur untuk menangkap peluang dan menghadapi ancaman baik ancaman fisik dan non-fisik yang harus dipadukan, maka terdapat enam aspek dimensi yang perlu diperkuat menjadi prioritas Pussansiad yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM). Pussansiad harus memiliki Sumber Daya Manusia (*Human Capital dan Human Resources*) yang harus terus dibangun kemampuannya dengan merekrut Perwira dan Bintara dengan keahlian atau talenta-talenta khusus sehingga langsung operasional karena untuk mendidik prajurit konvensional menjadi ahli siber



Danpussansiad dalam upaya membentuk *Cyber Community* menjadi narasumber dalam berbagai event Siber



Danpussansiad memberikan arahan kepada personel Satlak Kalsiber dalam kegiatan di *Security Operation Center (SOC)*

membutuhkan waktu 2-3 tahun.

**2. Tata Kelola.** Pussansiad perlu memperhatikan aspek tata kelola organisasi dalam hal ini berupa kumpulan piranti lunak dari doktrin-doktrin sebagai guideline dan roh organisasi yang berbentuk Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar), Petunjuk Referensi (Jukref) dan Petunjuk Teknis (Juknis) serta buku-buku pedoman.

**3. Teknologi.** P u s s a n s i a d memperkuat kemampuan *Social Media Analytic dengan Open Source Intelligent (OSINT)*, kemudian kekuatan dan kemampuan untuk *web intelligent* dan *social media intelligent* serta kemampuan *Digital Forensic* untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan guna melihat jejak digital dari target yang ditentukan. Disamping itu juga, Pussansiad telah membangun *SOC (Security Operation Center)* untuk melaksanakan Puskodal Pertahanan Kemanan Siber, khususnya ancaman yang berbasis fisik. SOC di lingkup TNI AD merupakan bagian dari SOC nasional.

**4. C5ISR (Command, Control, Computers, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).** Pussansiad perlu mengembangkan platform yang dapat mengintegrasikan teknologi pada perangkat-perangkat elektronik/siber yang digunakan sehingga meningkatkan kapabilitas antar sektor terkait yaitu Komando Pengendalian, Komputer, Komunikasi, Siber, Intelijen, Pengawasan dan Pengintaian dalam satu sistem.

**5. Cyber Awareness.** Pussansiad akan terus melakukan penguatan dari aspek *Cyber Awareness* atau kesadaran digital atau literasi digital, sebab menurut pendataan Pussansiad, sebanyak 60% terjadinya serangan siber terhadap prajurit TNI AD dan infrastruktur TNI AD disebabkan ketidaksadaran prajurit TNI AD terkait dengan serangan siber. *Cyber Awareness* yang masih rendah, sehingga begitu mendapat serangan dengan link-link APK, langsung diunduh dan meng-install-nya sehingga masuk virus dan merusak sistem. Dalam satu hari Pussansiad menghadapi 500-1000 serangan virus seperti ini. *Cyber*

Awareness dilakukan dengan proses melalui pendidikan, pelatihan, penataran, dan sosialisasi melalui *Mobile Training Team*, Bimtek dan lainnya untuk mendukung hal ini. Ini adalah bagian dari konsep sosialisasi terhadap ancaman siber di lingkungan TNI AD dan cara menghadapinya.

6. **Cyber Community.** Pussansiad juga harus melakukan penguatan *Cyber Community* atau Komunitas Siber, karena dalam dunia siber terdapat domain-domain siber yang tidak dapat dimasuki oleh domain siber lain. Contohnya domain *Cyber Crime* yang ditangani Polri, kemudian *Cyber Intelligent* sebagai pembinanya adalah BIN dan Bais TNI, Pussansiad bagian dari siber intelijen ini.

Dengan strategi mengembangkan dan memelihara aspek-aspek tersebut maka kegiatan operasional Pussansiad dalam melakukan tugas pokok untuk menangkal dan menindak ancaman siber di jajaran TNI Angkatan Darat semakin baik dan keberhasilan pelaksanaan tugas akan semakin meningkat.



Danpussansiad dalam upaya membentuk *Cyber Community* menjadi narasumber dalam berbagai event Siber



Danpussansiad dalam upaya membentuk *Cyber Community* menjadi narasumber dalam berbagai event Siber



Danpussansiad dalam upaya membentuk *Cyber Community* menjadi narasumber dalam berbagai event Siber

# INTEGRASI APLIKASI SISTEM INFORMASI TNI AD

**S**istem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas dan dalam rangka mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan TNI AD maka ditetapkan Sistek Info TNI AD melalui Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 14 Tahun 2021. Hal ini diperlukan agar terwujud tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan TNI AD. Sebagaimana tercantum dalam BAB II pasal 4 ayat 2, terdapat 10 unsur Sistek Info TNI AD yang harus diterapkan secara terpadu dimana penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terintegrasi untuk dapat menjamin terlaksananya interoperability antara beberapa sistem dan subsistem Sistek Info di lingkungan TNI AD, salah satunya adalah Aplikasi Sisfo TNI AD.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi optimalisasi penyelenggaraan Sistek Info TNI AD maka pada tulisan



**OLEH : BRIGJEN TNI NUGROHO SEPTIJANTONO, S.I.P.  
(KADISINFO LAHTAD)**

ini dibatasi pada pembahasan integrasi aplikasi sistem informasi TNI AD untuk mewujudkan data tunggal yang terpercaya dan pengambilan keputusan berbasis data untuk kepentingan strategis, dengan judul "Integrasi Aplikasi Sistem Informasi TNI AD". Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penulisan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara komprehensif melalui pengumpulan data dan informasi yang valid, yaitu dimulai dengan studi literature sebagai referensi integrasi sistem aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan menghimpun data permasalahan operasional aplikasi Sisfo TNI AD saat ini dan konsep pengintegrasian aplikasi Sisfo TNI AD.

Sistem informasi terintegrasi adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan proses bisnis di dalam suatu organisasi atau entitas tertentu, sehingga semua data yang dikelola menjadi satu kesatuan yang terpusat. Dalam sistem ini, data yang digunakan dan diproses oleh berbagai satuan kerja (Satker) dalam

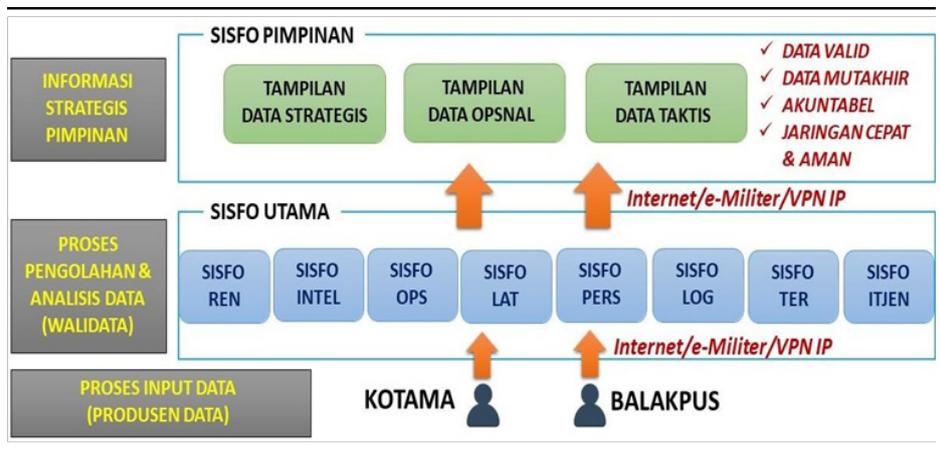
suatu organisasi hanya memiliki satu sumber data utama, yang disebut "satu data" (*single source*).

Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini Dinas Infolahta TNI AD telah membangun Aplikasi Sisfo TNI AD sebagai sarana berbasis digital dalam penyelenggaraan administrasi dan birokrasi guna mendukung tugas pokok TNI AD. Aplikasi Sisfo TNI AD dibagi atas Aplikasi Utama, Aplikasi Pendukung dan Aplikasi Tambahan dengan kondisi saat ini, sebagai berikut:

- a. Aplikasi Utama, meliputi: 1) Sisfo Perencanaan; 2) Sisfo Intel (belum terbangun); 3) Sisfo Operasi (belum terbangun); 4) Sisfo Latihan (belum terbangun); 5) Sisfo Personel; 6) Sisfo Logistik; 7) Sisfo Teritorial (belum terbangun); dan 8) Sisfo E-Audit Itjenad.
- b. Aplikasi Pendukung, meliputi: 1) Dashboard Kotama/Balakpus/Satuan; 2) Sisfo Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista; 3) Sisfo PII; 4) Sisfo PIT; 5) Sisfo Pusat Komando dan Pengendalian; 6) Sisfo Ditkuad; 7) Sisfo Pendidikan; 8) Sisfo Ditajenad (Dosir Elektronik); 9) Sisfo Kesehatan (Telemedicine TNI AD); 10) Sisfo Dispsiad; 11) Sisfo Disjasad; 12) Sisfo Pussenif; 13) Sisfo Pussenarhanud; 14) Sisfo Pussenarmed; 15) Sisfo Pusspenerbad; 16) Sisfo Pusziad; 17) Sisfo Pusbekangad; 18) Sisfo Puspalad; 19) Sisfo Ditkumad; 20) Sisfo Secapaad; 21) Sisfo Kodiklatad; 22) Sisfo Dal Ada; 23) LPSE; 24) CBT; 25) SIRUP TNI AD; 26) Aplikasi Notulen Setumad; dan 27) SIMRS RSPAD.
- c. Aplikasi Tambahan, meliputi: 1) Sistem Informasi Kesejarahan Angkatan Darat/SIKAD; 2) Website/PPID Pusat/Kotama/Balakpus; 3) E-TWPAD; 4) E-Office Disinfolahtad; 5) Mobile Office; 6) E-Library; 7) Aplikasi Anjab Disinfolahtad; dan 8) Aplikasi War Gammng (Seskoad).

Faktanya aplikasi Sisfo TNI AD yang sudah dibangun tersebut masih bersifat sektoral, belum terintegrasi dengan sisfo utama dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Gambar 1. Desain Arsitektur Input Data



Mengintegrasikan aplikasi sistem informasi TNI AD saat ini adalah sebuah tugas yang kompleks dan menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses ini meliputi:

- a. Keanekaragaman sistem dan aplikasi. Beragamnya sistem dan aplikasi TNI AD yang sudah ada saat ini jika diintegrasikan akan menjadi tantangan tersendiri karena terdapat perbedaan dalam format data, dan struktur database;
- b. Kebijakan keamanan dan privasi data. Mengintegrasikan data dari berbagai sumber memerlukan perhatian khusus terhadap kebijakan keamanan dan privasi data. Data yang sensitif dan rahasia harus dilindungi dengan baik dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang;
- c. Kompleksitas Data. Data-data yang ada saat ini memiliki kompleksitas tinggi, termasuk data personel, data komoditi, data lokasi, dan data lainnya. Menyatukan dan memahami data semacam ini memerlukan penanganan yang cermat dan tepat;
- d. Infrastruktur yang tersebar.

Infrastruktur Sistem Info TNI AD yang tersebar di Satker TNI AD di berbagai wilayah menyulitkan proses integrasi data karena memerlukan konektivitas yang handal;

e. Pengadopsian teknologi. Proses pengadopsian teknologi baru untuk mendukung integrasi data dapat menghadapi resistensi dari beberapa pihak, terutama jika ada perubahan proses atau dinamika *transfer of teknologi/knowledge* yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi baru;

f. Koordinasi antar satuan kerja (Satker) TNI AD. Mengintegrasikan data antar Satker TNI AD memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat;

g. Anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Untuk membangun sistem informasi terintegrasi membutuhkan investasi finansial dan SDM yang handal, sehingga diperlukan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan;

h. Kesiapan Data. Sebelum integrasi sistem informasi dilaksanakan, data harus dibersihkan, disempurnakan, dan disatukan dari berbagai sumber. Kesiapan data ini dapat memakan waktu dan tenaga tersendiri; dan

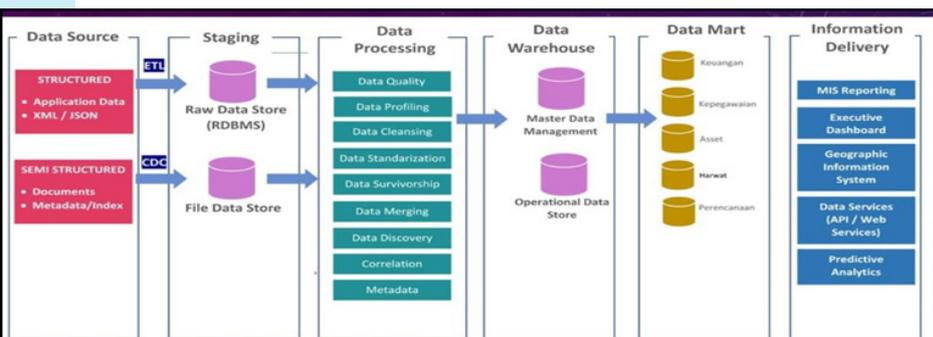
i. Perubahan budaya kerja dan manajemen. Membangun sistem informasi terintegrasi juga memerlukan perubahan budaya kerja dan manajemen dalam organisasi untuk mendukung adopsi teknologi baru dan meningkatkan kerjasama antar Satker TNI AD.

Konsep pengintegrasian Sisfo TNI AD diperlukan sejumlah teknologi yang memungkinkan integrasi data dari berbagai aplikasi dan sistem yang berbeda. Beberapa kebutuhan dukungan teknologi untuk sistem informasi terintegrasi yaitu: (1) *Enterprise Service Bus (ESB)*. ESB adalah teknologi yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara berbagai

aplikasi dan sistem. ESB berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sistem-sistem yang berbeda dengan protokol dan format yang seragam; (2) *Middleware*. *Middleware* adalah perangkat lunak yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain dalam satu manajemen data. *Middleware* berperan dalam mengintegrasikan, menyatukan, dan mentransformasi data dari berbagai sumber; (3) *Application Programming Interface (API)*. API memungkinkan interaksi antara berbagai aplikasi dengan cara yang terdefinisi dengan jelas. API memungkinkan sistem untuk berkomunikasi dan berbagi data secara aman dan efisien; (4) *Data Integration Tools*. Diperlukan alat-alat integrasi data seperti *Extract, Transform, Load (ETL)* atau *Extract, Load, Transform (ELT)* untuk mengambil data dari berbagai sumber, mentransformasikan dan membersihkan data (cleansing), dan memuatnya ke dalam satu sumber data terpusat; (5) *Data Warehouse*. *Data warehouse* adalah repositori data terpusat yang dirancang untuk melayani kebutuhan analisis dan pelaporan. Data dari berbagai sumber diintegrasikan ke dalam data *warehouse* untuk menyediakan "satu sumber kebenaran" (*single source of truth*) bagi pengguna; (6) *Master Data Management (MDM)*. MDM adalah pendekatan untuk mengelola data referensi inti, seperti data personel, komoditi, dan lokasi. MDM memastikan konsistensi data inti di seluruh sistem dan aplikasi dalam organisasi; (7) *Data Governance*. *Data governance* adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengelola data secara keseluruhan. Ini termasuk kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi yang mengarah pada manajemen data yang efektif dan kualitas data yang tinggi; (8) *Cloud Computing*. Menggunakan layanan *cloud computing* dapat memfasilitasi integrasi data dan aplikasi dengan lebih mudah karena dapat memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan aksesibilitas data yang diperlukan; (9) *Security and Access Control*. Karena sistem informasi terintegrasi

menggabungkan data dari berbagai sumber, keamanan data dan kontrol akses menjadi sangat penting untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses yang tidak sah; dan (10) *Big Data Technology*. Jika organisasi memiliki kebutuhan untuk mengintegrasikan dan menganalisis data dalam jumlah besar dan beragam, teknologi *big data* seperti *Hadoop* dan *Spark* dapat digunakan untuk memproses data secara efisien.

Gambar 2. Desain Arsitektur Pengolahan Data



Mengintegrasikan beberapa aplikasi Sisfo TNI AD yang sudah terbangun saat ini diperlukan perencanaan yang matang, komitmen dari para *Stakeholder*, melibatkan berbagai pihak terkait, dan mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada solusi. Pelaksanaan Integrasi aplikasi Sisfo TNI AD saat ini perlu dilaksanakan secara bertahap dimulai dari integrasi data yang sederhana dan berlanjut hingga mencakup sistem dan aplikasi yang lebih kompleks. Menyikapi hal tersebut Dinas Infolakta TNI AD telah menyusun arah kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi pada rencana induk atau grand design sistem informasi TNI AD Tahun 2020-2039, yaitu mewujudkan standar aplikasi Sisfo TNI AD yang memiliki sifat sederhana, lengkap, fleksibel, aman dan terpadu serta mempedomani prinsip terencana, terarah, terpadu dan tertib administrasi guna mendukung konsep big data analytic, artificial intelligence dan cloud computing system. Beberapa manfaat utama dari sistem informasi terintegrasi adalah:

a. Konsistensi data. Dengan satu

sumber data utama, informasi yang dihasilkan dari berbagai aplikasi akan konsisten dan akurat. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadi duplikasi data dan inkonsistensi informasi yang dapat menyebabkan masalah dalam pengambilan keputusan;

b. Efisiensi operasional. Dengan integrasi data, proses bisnis menjadi lebih efisien karena tidak ada lagi kebutuhan untuk menggandakan atau mengubah data di berbagai sistem

aplikasi yang berbeda. Data hanya perlu dimasukkan sekali dan dapat digunakan oleh semua aplikasi (*interoperability*) yang terhubung ke sistem informasi;

c. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena data yang digunakan adalah satu sumber kebenaran (*single source of truth*), keputusan yang diambil akan lebih dapat diandalkan dan tepat karena berdasarkan informasi yang konsisten dan akurat;

d. Peningkatan kolaborasi. Sistem informasi terintegrasi memungkinkan berbagai strata dan fungsi dalam organisasi untuk bekerja secara bersama dengan lebih baik karena mereka memiliki akses ke data yang sama dan dapat berbagi informasi dengan mudah; dan

e. Pengurangan biaya. Mengelola sistem informasi terintegrasi dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang karena menghilangkan kebutuhan untuk mengelola dan memelihara banyak sistem aplikasi yang terpisah

# FUNGSI STANDARDISASI DAN KELAIKAN ALUTSISTA TNI AD

## DALAM MENGUTAMAKAN KESELAMATAN PERSONEL DAN MATERIEL



Oleh : Brigjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si. (Kadislakad)

**A**lat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI) adalah bagian dari Alpalhankam yang merupakan satu kesatuan sistem senjata secara terintegrasi atau bagian dari sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (Permenhan RI No 4 tahun 2019). Data Alutsista TNI Angkatan Darat (Permenhan RI No 4 tahun 2019) meliputi: kendaraan tempur, senjata, munisi, kendaraan bermotor, alat optik, alat peralatan khusus, pesawat terbang, senjata pesawat terbang, munisi pesawat terbang dan alat angkut air.

Dinas Kelaikan TNI Angkatan Darat (Dislakad) adalah badan pelaksana pusat di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad, sesuai dengan

Doktrin TNI Angkatan Darat “Kartika Eka Paksi” tahun 2020. Dislakad bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan personel dan fungsi kelaikan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dislakad menyelenggarakan fungsi utama diantaranya fungsi standarisasi dan fungsi Kelaikan.

Fungsi standarisasi meliputi penyelenggaraan kegiatan antara lain: pengumpulan data materiel TNI AD, merumuskan standar materiel TNI AD, menetapkan standar materiel TNI AD, menerapkan standar materiel TNI AD serta merevisi standar materiel TNI AD.

Tujuan dari standarisasi merupakan proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab dan bekerja sama dengan semua pihak pemangku kepentingan. Proses merumuskan standar komoditi militer merupakan rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep standar sampai tercapainya konsensus dari pihak pemangku kepentingan.



Kegiatan Pengumpulan Data

Pelaksanaan kegiatan standardisasi materiel komoditi militer dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jukmin tentang Standardisasi Komoditi Militer Angkatan Darat Nomor KEP/918/XI/2017 tanggal 30 November 2017, kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder materiel TNI AD, yaitu pemeriksaan terhadap data/dokumen materiel alut dan alutsista di satuan pengguna (batalyon, detasemen, kompi, dan peleton) di seluruh wilayah Indonesia meliputi data TOP/DSPP materiel alut dan alutsista satuan dihadapkan dengan kondisi nyata di lapangan, dokumen asal serah terima materiel dari hasil pengadaan, petunjuk penggunaan/*manual book*, dokumen pemeliharaan alut dan alutsista serta dokumen perlengkapan pendukung yang diperoleh dan pembina materiel antara lain: sertifikat jaminan garansi pabrikan serta pemeliharaan berkala dari penyedia barang dan jasa/mitra. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan perumusan standar materiel, adalah kegiatan memilah dan menyusun konsep kode standar militer Indonesia sampai tercapainya konsensus dari pihak pemangku kepentingan karena sampai dengan saat ini materiel TNI AD belum memiliki kode standar militer Indonesia guna memudahkan identifikasi jenis materiel *military specification* dan sipil baik dalam pengadaan baru maupun pemeliharaan materiel. selanjutnya adalah penetapan standar materiel, yaitu setelah tercapai hasil konsensus dengan pemangku kepentingan maka kode standar militer Indonesia ditetapkan oleh Kadislaikad untuk digunakan sebagai acuan dalam proses pengadaan baru dan hasil pemeliharaan. Berikutnya adalah penerapan standar materiel yakni Penyelenggaraan penerapan standar komoditi militer dilaksanakan secara terencana, teliti, dan terarah agar pencapaian sasaran dapat optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan penyelenggaraan penerapan standar komoditi militer perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

Penerapan standar komoditi militer merupakan kegiatan penggunaan yang menjadi tanggung jawab staf umum Angkatan Darat, pembina materiel, badan penelitian dan pengembangan serta kelaikan dengan melibatkan satuan pengguna di lingkungan TNI Angkatan Darat dan industri komoditi militer dalam negeri dan luar negeri sebagai penyedia barang. selanjutnya adalah merevisi standar materiel Kegiatan ini memerlukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan pemangku kepentingan, sehingga standar komoditi militer hasil kegiatan penerapan dapat dievaluasi untuk dilaksanakan revisi sesuai keinginan dan kebutuhan satuan.

Fungsi Kelaikan adalah menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan terpenuhinya penerapan peraturan dan pengujian untuk pengadaan, hasil pemeliharaan, kesiapan operasional dan latihan serta kelaikan profesi dan manajemen sehingga komoditi militer sesuai standar dan siap dioperasikan atau digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan kelaikan antara lain: sertifikasi kelaikan materiel hasil pengadaan baru, hasil pemeliharaan dan pemeriksaan



Kegiatan Sertifikasi Materiel

kelaikan dalam rangka latihan dan tugas operasi diantaranya kelaikan pesawat udara dan kelaikan PUO. Tujuan dari kelaikan adalah agar alut dan alutsista dapat dioperasionalkan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan standar rancang bangun dan fungsi asasi dalam jangka waktu tertentu.



Pemeriksaan Kelaikan Dalam Rangka Latbakjatrak

Berdasarkan pedoman Jukmin tentang Kelaikan Komoditi Militer di Lingkungan Angkatan Darat Nomor Kep/919/XI/2017 tanggal 30 November 2017, sertifikasi kelaikan materiel hasil pengadaan pada pelaksanaan kegiatannya meliputi 7 langkah: 1. Proses penerbitan persetujuan tipe antara lain proses aplikasi, verifikasi dokumen, pemeriksaan kesesuaian antara dokumen rancang bangun dengan hasil produk dan persetujuan tipe yang dikeluarkan oleh kadislaikad. 2. Proses verifikasi dokumen produksi antara lain verifikasi terhadap dokumen produksi, verifikasi Buku Petunjuk Penggunaan, verifikasi Buku Petunjuk Pemeliharaan, verifikasi untuk Katalogisasi /Penomoran Produk/Komponen dan melaksanakan pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan proses produksi kondisi militer. 3. Persetujuan Uji Mutu antara lain melaksanakan verifikasi dokumen rencana uji non destruktif dan uji destruktif, Tim Penguji Pabrikasi Komoditi Militer melaksanakan uji mutu sesuai regulasi atau sandar yang telah disepakati

dan melaksanakan verifikasi dokumen persetujuan uji mutu yang diterbitkan oleh pabrikasi. 4. Proses penerbitan nomor registrasi sementara antara lain: Tim Uji kelaikan Komoditi Militer membuat laporan kepada Kalakgiat tentang kesiapan fisik Komoditi Militer yang telah dilengkapi dengan dokumen persetujuan uji mutu, selanjutnya Kalakgiat mengajukan Nomor Registrasi Sementara kepada Kadislaikad, selanjutnya Kadislaikad menerbitkan Nomor Registrasi Sementara. 5. Proses penerbitan izin khusus antara lain: Kalakgiat kelaikan Komoditi Militer mengajukan ijin khusus dalam rangka uji terima Komoditi Militer kepada Kadislaikad dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk dapat melaksanakan uji terima Komoditi Militer yang telah dilengkapi Nomor Registrasi Sementara selanjutnya Kadislaikad mengeluarkan Surat Ijin Khusus. 6. Proses persetujuan penerimaan yaitu penerbitan *Acceptance Approval* yang dilaksanakan melalui uji terima dengan melibatkan pihak terkait. 7. Proses penerbitan Sertifikat Kelaikan Militer antara lain: Tim Kelaikan Komoditi Militer melaksanakan pengecekan terakhir terhadap dokumen Sertifikasi Kelaikan, Kalakgiat Kelaikan Komoditi Militer membuat laporan kegiatan kelaikan Komoditi Militer yang telah memenuhi persyaratan dan peraturan keselamatan yang berlaku kepada kadislaikad, selanjutnya Kadislaikad menerbitkan Sertifikat Kelaikan Militer.

Berdasarkan Juknis tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pesawat Udara TNI AD Nomor Kep/ 548/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, kegiatan sertifikasi kelaikan pesawat udara dilaksanakan meliputi kegiatan verifikasi dokumen, yaitu Pemeriksaan terhadap data/dokumen pesawat udara serta dokumen perlengkapan pendukung yang diperoleh dari Satuan Pengguna dan Pembina Materiel antara lain: dokumen pemeliharaan dan dokumen pengoperasian. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan *conformity*, yaitu pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik



Pemeriksaan Kelaikan Dalam Rangka Latihan YTP

pada pesawat udara dan kelengkapan pendukung antara lain *aircraft* fisik, radio dan navigasi. Sebagai langkah akhir dari kegiatan sertifikasi pesawat udara adalah *functional test*, yaitu Pemeriksaan terhadap kemampuan pesawat udara pada saat dioperasikan dengan hasil *aircraft performance* sesuai dengan *protocol test* yang dikeluarkan oleh *manufacture* antara lain *Ground test* dan *Flight test*.

Pemeriksaan kelaikan dalam rangka latihan dan tugas operasi dilaksanakan dengan terlebih dulu adanya pengajuan pemeriksaan kelaikan dari Satuan kepada Mabesad agar Dislaikad melaksanakan pemeriksaan kelaikan alut dan alutsistanya, selanjutnya Mabesad menerbitkan ST kepada Dislaikad untuk melaksanakan pemeriksaan kelaikan terhadap alutsista yang akan digunakan, kemudian Dislaikad berkoordinasi dengan Satwah diikuti dengan pemeriksaan materiel (Rikmat) oleh LKT dan dilanjutkan dengan pelaksanaan

pemeriksaan kelaikan. Pemeriksaan Kelaikan dilaksanakan meliputi 3 langkah yaitu verifikasi dokumen, *conformity* dan *functional test*. Pemeriksaan kelaikan alut dan alutsista dilaksanakan dalam rangka Latjugar, Latjuntis PUO baik statis maupun *Freefall*, Latbakjatrat, Latihan YTP, Latihan Ancab, Latgab dan Latma.

Peran Dislaikad dalam melaksanakan fungsi standardisasi dan kelaikan alut dan alutsista TNI AD hasil pengadaan baru, hasil pemeliharaan, kesiapan latihan dan kesiapan operasi diharapkan dapat mengutamakan keselamatan yang diandalkan dengan menentukan alut dan alutsista apakah dalam kondisi Laik atau dalam kondisi Tidak Laik. Alut dan alutsista dalam kondisi Laik dapat dioperasikan sedangkan alut dan alutsista dalam kondisi Tidak Laik harus dilaksanakan perbaikan atau pergantian suku cadang sampai alut dan alutsista tersebut berfungsi dengan baik sehingga siap dioperasikan.

# TUGAS DAN FUNGSI DITTOPAD

## DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK KEPENTINGAN MILITER

Tuntutan dan tantangan tugas satuan TNI AD di masa yang akan datang semakin dinamis dihadapkan pada tuntutan tugas serta bentuk operasi yang semakin kompleks. Taktik dan strategi operasi juga telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dihadapkan pada perkembangan teknologi alutsista yang mengarah kepada bentuk operasi salah satunya peperangan berteknologi tinggi (*cyber warfare, network centric warfare, perang berbasis robotic dan nano technology*).

Dittopad menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi survei data, pengolahan data, produksi dan materiel topografi, serta dukungan topografi guna mendukung fungsi utama TNI AD.<sup>1</sup> Di era revolusi industri 4.0 saat ini teknologi informasi geospasial berbasis digital termasuk *artificial intelligent* menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas TNI AD. TNI AD sebagai alat negara yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dilakukan melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).<sup>2</sup>



Oleh : Brigjen TNI Ir. Adik Sugianto  
(Dirtopad)

### Tantangan Tugas Di Era Informasi Digital

Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dewasa ini memengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara.<sup>3</sup> Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>4</sup> Tantangan tugas TNI AD masa depan semakin dinamis dan kompleks, hal ini sejalan dengan revolusi industri 4.0 yang telah menghasilkan teknologi-teknologi baru yang modern, termasuk teknologi militer. Sebagai bagian dari TNI, TNI AD dituntut untuk

<sup>1</sup>Keputusan Kasad Nomor Kep/1024/XIII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

<sup>2</sup>Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>3</sup>Kemenhan RI, 2015, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta : Kemenhan RI.

<sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

terus melakukan transformasi teknologi dan personel yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan.<sup>5</sup> Topografi merupakan salah satu kecabangan TNI AD yang menyelenggarakan kemampuan dukungan meliputi survei data, pengolahan data, produk dan materiil, serta dukungan topografi.<sup>6</sup> Tantangan tugas di era digital memerlukan big data topografi atau geospasial.

bencana alam dan lingkungan, wabah penyakit, pencucian uang, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta dampak lain dari perkembangan revolusi industri 4.0.

Dalam pelaksanaan tugas, TNI dan TNI AD membutuhkan informasi tentang medan operasi (informasi geospasial) digital mutakhir, akurat dan mudah di akses untuk proses pengambilan keputusan. Kecerdasan artifisial merupakan teknik

yang memungkinkan komputer ditanamkan kecerdasan manusia menggunakan logika (aturan), *machine learning* dan *deep learning*.<sup>7</sup> Sebagai contoh, teknologi kecerdasan artifisial telah digunakan untuk melakukan deteksi dan klasifikasi objek penginderaan jauh dari sensor, satelit, dan drone. Data dari hasil deteksi dan klasifikasi tersebut kemudian akan disinergikan dengan

hasil intelijen lapangan untuk diolah menjadi produk strategis perencanaan dan operasi militer. Perubahan teknologi militer yang digunakan akan mempengaruhi pola operasi yang dilaksanakan.<sup>8</sup> Topografi memiliki peran penting dalam operasi militer, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi operasi. Pelibatan Dittopad dalam operasi militer matra darat dikelompokkan menjadi pemberdayaan, keterpaduan, pengamanan dan perlawanan.<sup>9</sup>



### Tantangan Tugas di Era Informasi Semakin Kompleks

Indonesia memiliki peran strategis sekaligus potensi kerawanan terhadap kompleksitas permasalahan, baik isu mengenai tapal batas (*border*), keamanan nasional (*national security*) atau keamanan manusia (*human security*), penyelundupan barang. Ancaman aktual yang cenderung akan terus berlanjut berupa pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme, perampokan, pembajakan, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, intelijen dan spionase, serangan senjata biologis,

<sup>5</sup> Keputusan Kasad Nomor Kep/1024/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> "Artificial Intelligence and GeoSpatial Analysis." Geospatial World, 2020.

<sup>8</sup> Andi Wijayanto, Iis Ginarsah, Febry Triantama dan Dizar R. Sabana, 2022, Transformasi Perang Darat 2045 : Studi dan Proyeksi Operasi TNI AD, Jakarta : Rumah Cetak Tombo.

<sup>9</sup> Keputusan Kasad Nomor Kep/1061/XI/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Doktrin Operasi Militer Matra Darat "Kartika Yudha"



Pembekalan materi informasi geospasial kepada Satgas Pamtas oleh personel Dittopad

## Informasi Geospasial Untuk Kepentingan Militer

Dalam era digital ini, efektivitas dari pemanfaatan data sangat tergantung pada kemampuan manajemen ketersediaan data, interpretasi data secara cepat, dan penggabungan unsur dinamika lapangan yang semakin kompleks. Operasi militer modern melibatkan berbagai unsur kesatuan dan lembaga yang membutuhkan kemampuan pemahaman, perencanaan, dan koordinasi berbasis sistem digital. Informasi geospasial sangat berpotensi untuk digunakan, tidak hanya sebagai platform modern pemetaan, namun juga sebagai platform integrasi data, sintesa pemahaman, koordinasi antar kesatuan dan lembaga, juga sebagai platform *geo-intelligence*.<sup>10</sup> Tantangan pertahanan nasional di era digital adalah adanya data digital yang sangat besar (*big data*). Jumlah data digital yang besar memerlukan penanganan sistem yang terintegrasi tidak saja oleh Dittopad tetapi juga bersumber dari lembaga lain. Sistem ini harus memungkinkan pertukaran data digital sesuai kebutuhan secara cepat, akurat, *up to date* namun tetap aman (*secure*). Menjawab tantangan tugas dalam penyediaan informasi geospasial, maka Dittopad menyelenggarakan penyediaan informasi geospasial untuk militer secara lebih modern.

Informasi geospasial digital ini sangat berguna dalam melaksanakan tugas TNI AD baik dalam latihan maupun operasi. Peran penyediaan informasi geospasial oleh Dittopad telah terbukti dalam pelaksanaan latihan misalnya BTP, pertempuran hutan, Garuda Shield dan sebagainya. Dalam operasi, informasi geospasial digital telah memberikan pengaruh besar dalam keberhasilan operasi. Keterlibatan Dittopad sebagai penyedia informasi geospasial dapat dilihat pada operasi anti teror Poso (Mandago Raya/Tinombala), operasi keamanan Papua, operasi pengamanan perbatasan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan tugas, TNI AD membutuhkan informasi tentang medan operasi (informasi geospasial) digital mutakhir, akurat dan mudah di akses untuk proses pengambilan keputusan. Dittopad berperan menyediakan informasi geospasial digital daerah operasi secara cepat, akurat dan mutakhir, pengembangan aplikasi geospasial untuk kepentingan TNI AD. Dittopad memiliki tugas penyediaan informasi geospasial dalam bentuk peta, data dan analisa medan secara cepat, akurat dan up to date. Pada intinya Informasi medan/geospasial yang up to date dan akurat merupakan adalah satu faktor penentu keberhasilan operasi.



Informasi geospasial dengan pemantauan real time pada Satgas Pam Papua

<sup>10</sup> <https://jurnalapps.co.id/esri-indonesia-dittopad-bersinergi-hadapi-era-disrupsi-digital-dalam-pertahanan-nasional-110649>.

# PENERBAD MODERN PROFESIONAL DAN ANDAL



Oleh : Mayjen TNI Toto Nugroho, S.I.P., M.Si  
(DANPUSPENERBAD)

**P**usat Penerbangan Angkatan Darat (disingkat Puspenerbad) dengan semboyan “Wira Amur” (Prajurit Terbang) merupakan salah satu Badan Pelaksana Pusat di tingkat TNI Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, bertugas melaksanakan operasi Penerbangan Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat yang bermarkas di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.

Sejak berdirinya Penerbangan Angkatan Darat pada tanggal 14 Nopember 1959 disingkat Penerbad adalah badan pelaksana fungsi teknis militer khusus bidang penerbangan dengan tugas pokok meningkatkan mobilitas satuan darat

menggunakan Pesawat Terbang. Berdirinya Puspenerbad atau lebih dikenal Penerbad, diawali oleh suatu kebutuhan bagi Angkatan Darat guna mendukung pelaksanaan operasi tempur darat. Hal ini menjadi pertimbangan penting, ditinjau dari perhitungan taktis dihadapkan dengan kondisi medan berupa pulau-pulau, rawa-rawa, hutan dan gunung. Di sisi lain, untuk kepentingan pergeseran pasukan prasarana jalan darat juga sangat terbatas. Dengan kondisi seperti inilah dibutuhkan unsur Penerbad sehingga memperoleh efektifitas operasi. Dengan kondisi demikian itulah, maka Pimpinan Angkatan Darat (pada bulan Oktober 1959, memerintahkan kepada Deputy II/KSAD pada tanggal 20 Oktober 1959) memerintahkan agar membentuk Detasemen Penerbangan Angkatan Darat yang kedudukannya disejajarkan dengan organisasi Pusat Kesenjataan yang lainnya, seperti Pussenif, Pussenkav serta Pussenarmed.

## Tugas Pokok.

Sama halnya dengan korps lain di TNI AD, Puspenerbad memiliki Tugas Pokok, terutama tugas yang berkaitan dalam bidang penerbangan. Puspenerbad bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kecabangan, pembinaan personel dan fungsi penerbangan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat

Penerbad sebagai satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi didalam melaksanakan fungsinya mengoperasikan pesawat sayap tetap (Fixed wing) dan pesawat sayap putar (Rotary Wing) sebagai alat utamanya. Kerjasama satuan Penerbad dengan satuan darat lainnya dalam suatu operasi matra darat maupun operasi gabungan akan dapat terjalin kerjasama yang baik,

apabila satuan darat mengetahui fungsi, kemampuan dan batas kemampuan serta ketentuan pokok penggunaan satuan Penerbad dalam melaksanakan operasi yang akan dilaksanakan.

## Fungsi.

Agar tugas pokok Puspenerbad dapat terlaksana dengan baik, Puspenerbad menyelenggarakan fungsi-fungsi diantaranya yang lebih dikenal dengan 5 Fungsi Penerbad. Adapun 5 Fungsi Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad) adalah Memperbesar mobilitas tempur TNI Angkatan Darat, antara lain: 1. Intelijen Pertempuran: adalah penggunaan penerbangan untuk kepentingan pengintaian melalui udara; 2. Manuver: operasi dimana pasukan-pasukan tempur darat beserta perlengkapannya diangkut melalui udara (dengan pesawat Helikopter TNI AD) pindah kesekitar daerah tempur, dibawah pengendalian dari Komandan Satuan Darat, untuk dilibatkan dalam suatu pertempuran; 3. Tembakan: bantuan tembakan yang diberikan helikopter serang Penerbad untuk memperbesar atau mengisi kekosongan tembakan yang ada, yang diberikan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan rencana operasi satuan tempur darat yang dibantu; 4. Perlindungan: fungsi yang berkenaan dengan penggunaan alutsista berupa Helikopter Serang dengan persenjataannya untuk memberikan perlindungan udara terhadap pergerakan taktis satuan darat dalam melaksanakan Perlindungan Udara baik OMP maupun OMSP bersifat tempur antara lain kawal mobud dan kawal pemindahan pasukan; 5. Dukungan: Merupakan unsur bantuan

tempur dalam memberikan dukungan taktis kepada pasukan darat berupa Angkut VIP dan VVIP, angkut personel, Pembekalan dan evakuasi serta Search and Rescue (SAR)



Organisasi Penerbangan Angkatan Darat dibentuk berdasarkan kebutuhan tugas TNI AD guna menyelenggarakan bantuan penerbangan kepada satuan darat. Organisasi penerbangan Angkatan Darat disusun berdasarkan DSPP terdiri satuan pembinaan dan satuan operasional. Satuan pembinaan meliputi: Satuan Penerbangan TNI AD tingkat pusat yaitu Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad); Satuan Pangkalan Udara Angkatan Darat terdiri: Pangkalan Udara Utama Angkatan Darat (Lanumad), Pangkalan Udara Angkatan Darat (Lanudad); Satuan Pendidikan Penerbangan TNI AD yaitu pusat pendidikan penerbangan TNI AD (Pusdikpenerbad) merupakan badan pelaksana dibawah komando pengendalian Puspenerbad; dan Badan Pelaksana Pengadaan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Balakada). Sedangkan Satuan Operasional meliputi: Bengkel Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Bengpuspenerbad); dan Skadron penerbangan, merupakan satuan penerbangan setingkat Batalyon terdiri: Skadron-11/AAJ, Skadron-12/AJY, Skadron-13/ABY, Skadron-21/AAY, dan Skadron-31/AYC.

## Dislokasi Satuan.

Dislokasi Satuan Penerbad saat ini terdapat di beberapa wilayah/daerah yaitu:

di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Satuan Penerbad yang berada di Pulau Jawa (Semarang Jawa Tengah dan Pondok Cabe Tangerang Selatan) antara lain: 1. Markas Puspenerbad berada di Pangkalan udara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Banten 2. Pusdikpenerbad. Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat Puspenerbad, disingkat Pusdikpenerbad Puspenerbad adalah badan pelaksana Puspenerbad yang berkedudukan

langsung di bawah Danpuspenerbad. Pusdikpenerbad Puspenerbad berada di Semarang Jawa Tengah, bertugas pokok menyelenggarakan pendidikan kecabangan Penerbangan Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok Puspenerbad; 3. Lanumad Ahmad Yani. Pangkalan Udara Utama Angkatan Darat Ahmad Yani, disingkat Lanumad A. Yani adalah eselon pelaksana di tingkat Puspenerbad yang berkedudukan langsung di bawah Danpuspenerbad. Lanumad A. Yani berada di Semarang Jawa Tengah, bertugas pokok menyelenggarakan pengurusan pangkalan udara utama Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok Puspenerbad; 4. Bengpuspenerbad. Bengkel Pusat Penerbangan Angkatan Darat, disingkat Bengpuspenerbad adalah eselon pelaksana di tingkat Puspenerbad yang berkedudukan langsung di bawah Danpuspenerbad. Bengpuspenerbad berada di Semarang Jawa Tengah, bertugas pokok menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan materiil pesawat udara dalam rangka mendukung tugas pokok Puspenerbad; 5. Balakada Puspenerbad. Badan Pelaksana Pengadaan Pusat



Penerbangan Angkatan Darat, disingkat Balakada Puspenerbad adalah badan pelaksana di tingkat Puspenerbad yang berkedudukan langsung di bawah Danpuspenerbad. Balakada Puspenerbad berada di Pangkalan Udara Pondok Cabe Tangerang Selatan Banten, bertugas pokok menyelenggarakan pemilihan penyedia barang/jasa pengadaan materiil penerbangan dalam rangka mendukung tugas pokok Puspenerbad; 6. Skadron-11/AAJ. Skadron-11/Amur Amara Jaya, disingkat Dron-11/AAJ adalah eselon pelaksana di tingkat Puspenerbad yang berkedudukan langsung di bawah Danpuspenerbad. Dron-11/AAJ berada di Semarang Jawa Tengah, bertugas pokok menyelenggarakan bantuan tempur dalam rangka mendukung tugas pokok Puspenerbad; 7. Skadron-21/AAY. Skadron-21/Aqasa Akraya Yudha, disingkat Dron-21/AAY adalah unsur pelaksana di tingkat Puspenerbad yang berkedudukan langsung di bawah Danpuspenerbad. Dron-21/AAY berada di Pangkalan Udara Pondok Cabe

Tangerang Selatan Banten, bertugas pokok menyelenggarakan dukungan udara guna memperbesar mobilitas satuan yang dibantu dalam rangka mendukung tugas pokok Puspenerbad; dan 8. Skadron-31/AYC. Skadron-31/Amur Yudha Cakti, disingkat Dron-31/AYC adalah eselon pelaksana di tingkat Puspenerbad yang berkedudukan langsung di bawah Danpuspenerbad. Dron-31/AYC berada di Semarang Jawa Tengah, bertugas pokok menyelenggarakan bantuan tempur guna memperbesar mobilitas tempur TNI AD melalui udara dengan melaksanakan manuver, tembakan, perlindungan, dan dukungan dalam rangka mendukung tugas pokok Puspenerbad.

Satuan Penerbad yang berada di Pulau Sumatera (Lampung) diantaranya: 1. Lanud Gatot Soebroto. Pangkalan Udara Angkatan Darat Puspenerbad, disingkat Lanudad Puspenerbad adalah badan pelaksana Puspenerbad yang berkedudukan langsung di bawah Danpuspenerbad. Lanudad Gatot

Soebroto Puspenerbad berada di Way Kanan Lampung bertugas pokok menyelenggarakan pengendalian pangkalan udara dan pelayanan operasional penerbangan TNI AD di wilayah tanggungjawabnya dalam rangka mendukung tugas pokok Puspenerbad; dan 2. Skadron-12/AJY. Skadron-12/Amur Jaya Yudha Pusat Penerbangan Angkatan Darat, disingkat Dron-12/AJY Puspenerbad adalah satuan bantuan tempur Penerbad yang berkedudukan langsung dibawah Danpuspenerbad. Dron-12/AJY Puspenerbad berada di Way Kanan Lampung bertugas pokok menyelenggarakan bantuan tempur Penerbad guna memperbesar derajat mobilitas satuan Angkatan Darat dalam pelaksanaan operasi militer untuk perang maupun selain perang guna mendukung tugas pokok Puspenerbad.



Dalam perkembangan Penerbad dari awal berdirinya hingga saat ini dan di masa yang akan datang terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Penerbad telah mampu melaksanakan berbagai macam tugas operasi, baik Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang. Kedepannya Penerbad akan semakin berkembang dan akan membentuk Satuan operasional baru, dari Sabang sampai Merauke. Selain pembentukan Satuan baru Penerbad, salah satu kebijakan yang diambil pimpinan TNI AD dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan mencanangkan program modernisasi dan revitalisasi alutsista. Modernisasi alutsista telah menjadi prioritas pemenuhan bagi satuan TNI AD, termasuk Puspenerbad sebagai salah satu badan pelaksana pusat TNI AD dalam bidang Penerbangan. Puspenerbad mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter yang sarat dengan teknologi modern. Penerbad akan dikembangkan baik kekuatan, kemampuan dan gelar dengan membangun satuan-satuan Penerbad sesuai dengan gelar wilayah Indonesia. Satuan tersebut akan dilengkapi dengan alutsista modern untuk menghadapi setiap ancaman baik yang factual maupun potensial. Akan tetapi dalam perkembangannya Penerbad tidak luput dari hambatan dan tantangan yang secara tidak langsung telah memberikan pengaruh besar untuk menjadikan Penerbad menjadi lebih maju dan berkembang.



Di pulau Kalimantan, saat ini Satuan Penerbad baru berdiri satu Satuan Operasional yaitu: Skadron-13/ABY. Skadron-13/Amur Balotama Yudha Pusat Penerbangan Angkatan Darat, disingkat Dron-13/ABY Puspenerbad adalah satuan bantuan tempur Penerbad yang berkedudukan langsung dibawah Danpuspenerbad. Dron-13/ABY Puspenerbad berada di Pangkalan Udara Kalimaru Berau Kalimantan Timur bertugas pokok menyelenggarakan bantuan tempur Penerbad guna memperbesar derajat mobilitas satuan Angkatan Darat dalam pelaksanaan operasi militer untuk perang maupun selain perang.

Sejarah memang tidak bisa dilupakan, bahkan pemimpin bangsa ini mengatakan “jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Pengalaman sejarah merupakan guru yang paling berharga. Dengan belajar sejarah maka kita akan dapat menghargai dan menghormati para pendiri Satuan Penerbad, termasuk menjadikan suatu pelajaran berharga dalam membangun satuan Penerbad kedepan. Sebagai insan Wira Amur, diwajibkan memahami sejarah Penerbad dari mulai berdiri hingga perkembangannya saat ini, sehingga diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman Satuan sebagai dasar dalam berpikir untuk masa sekarang dan yang akan datang guna terwujudnya Penerbad yang Modern, Profesional dan Andal.



# PERAN SATUAN KOREM 033/WIRA PRATAMA GUNA MENGATASI POTENSI ANCAMAN DI WILAYAH PERBATASAN KEPULAUAN RIAU

*“...Change is a planned, systematic, and controlled effort to alter more than one aspect of an organization, namely: (1) tasks, (2) structure, (3) technology, (4) the way organizational members think, in order to effectively achieve the organization’s goals.”*

- Charles L. Wood

Wilayah perbatasan Kepulauan Riau (Kepri) memiliki nilai strategis dan geopolitis yang sangat penting bagi Indonesia.<sup>1</sup> Kepulauan Riau terletak di sebelah timur Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Wilayah perbatasan ini memiliki sejumlah kerawanan yang perlu mendapat atensi lebih, diantaranya mencakup masalah keamanan, ekonomi, serta lingkungan hidup. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan (LCS) dan Selat Malaka. Kondisi geografis Kepri berupa kepulauan yang tersebar membuat wilayah ini memiliki peran strategis dalam sistem pertahanan negara. Posisi Kepri yang berbatasan dengan negara tetangga dan LCS menimbulkan kerawanan tersendiri yang perlu menjadi atensi bersama. Tentunya agar dapat menghadapi potensi ancaman dengan kondisi wilayah geografis berupa pulau-pulau tersebar, diperlukan strategi dan pengerahan kekuatan yang tepat sehingga dapat mencakup ke seluruh wilayah Kepri. Kondisi saat ini, Korem 033/WP belum memiliki struktur organisasi dan perlengkapan Alutsista yang ideal



**OLEH : BRIGJEN TNI JIMMY WATUSEKE  
(DANREM 033/WIRA PRATAMA KODAM I/BB)**

untuk dapat menjalankan tugasnya mengamankan wilayah Kepri dengan maksimal. Kepri sendiri merupakan wilayah perbatasan Indonesia yang memiliki banyak nilai-nilai strategis.

Kawasan perbatasan seperti Kepri memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan karena mempengaruhi kedaulatan wilayah negara, hubungan internasional, dan stabilitas keamanan dalam negeri.<sup>2</sup> Selain kekuatan personel, mempertahankan kedaulatan negara juga memerlukan alat bantu berupa peralatan dan persenjataan militer. Dalam konteks ini, kekuatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memegang peranan

<sup>1</sup>Butje Tampi, "Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)," *Jurnal Hukum Unsrat*, 2017.

<sup>2</sup>"Fgd-Pembahasan-Rancangan-Peraturan-Pemerintah-Tentang-Tugas-Tni-Dalam-Pengamanan-Wilayah-Perbatasan.html," accessed October 25, 2023, <https://www.kemhan.go.id/strahan/2023/08/10/fgd-pembahasan-rancangan-peraturan-pemerintah-tentang-tugas-tni-dalam-pengamanan-wilayah-perbatasan.html>.

vital dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Kepri. Korem 033/Wira Pratama (Korem 033/WP) sebagai bagian dari Kodam I/BB, memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam I/BB. Komposisi Korem 033/Wira Pratama membawahi 4 Kodim (34 Koramil) dan 1 Satuan Tempur, yakni Batalyon Infanteri 136/Tuah Sakti.<sup>3</sup> Kodim memiliki peran penting dalam pertahanan negara, seperti pengamanan wilayah strategis, pengamanan perbatasan, dan pengamanan objek vital nasional. Kodim juga bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat dan wilayahnya dari ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas wilayah. Kodim juga berperan dalam membantu pemerintah dalam memberantas terorisme dan narkoba. Sedangkan Yonif bertugas untuk membantu Kodim dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Yonif memiliki personel yang terlatih dan dilengkapi dengan alat dan persenjataan modern yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman dalam pertahanan negara.<sup>4</sup>

Karakteristik Geografis yang berdekatan dengan negara tetangga serta berbatasan langsung dengan *nine-dashed line* di LCS menimbulkan potensi ancaman di wilayah Kepri. Terdapat dua hal penting yang merupakan ancaman strategis non militer di wilayah ini. Pertama, Kepentingan Maritim Internasional. Selat Singapura merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia, menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia.

Ancaman terhadap keamanan di selat Singapura dapat berdampak langsung pada perdagangan internasional dan perekonomian global. Selanjutnya yang kedua adalah Sumber Daya Alam. Kepulauan Riau kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, hasil hutan, serta ikan. Keberadaan sumber daya alam ini menjadikan wilayah ini menarik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam eksploitasi ilegal atau sengketa teritorial. Sedangkan ancaman militer di wilayah Kepulauan Riau, juga terbagi dua. Pertama, keberadaan Angkatan Laut Asing, wilayah Kepulauan Riau berdekatan dengan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, yang memiliki kehadiran militer yang signifikan. aktivitas militer asing di wilayah ini dapat dianggap sebagai ancaman potensial jika tidak diawasi dengan cermat. Yang kedua, kedaulatan dan keamanan perbatasan sebagai wilayah perbatasan, dalam hal ini Kepulauan Riau menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perbatasan. Ini termasuk masalah penyelundupan, perdagangan ilegal, dan ancaman terorisme.

Fenomena yang terjadi belakangan ini menunjukkan fakta-fakta empirik, di antaranya kapal patroli Korpolaairud Baharkam KP Bisma-8001 menangkap dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam karena melakukan pencurian ikan di laut Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Kapal tersebut ternyata sudah beroperasi mencuri ikan selama 17 tahun, modus kedua kapal ikan berbendera Vietnam itu dalam melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia dengan mengganti dan mematikan kode AIS Indonesia.<sup>5</sup> Modus tersebut diketahui berulang kali untuk mengelabui kejaran petugas. Fenomena tersebut selain merupakan ancaman strategis, juga merupakan ancaman militer. Menhan RI, Prabowo mengatakan ancaman militer masih berpotensi membahayakan

<sup>3</sup>“Makorem,” KOMANDO RESOR MILITER 033/WIRA PRATAMA (blog), January 28, 2013, <https://korem033wp.mil.id/makorem/>.

<sup>4</sup>“Apa Itu Kodim? - Sejarah, Fungsi, Dan Peran Dalam Militer Indonesia - Eka Sulistyana,” June 24, 2023, <https://ekasulistyana.web.id/apa-itu-kodim-sejarah-fungsi-dan-peran-dalam-militer-indonesia/>.

<sup>5</sup> Alamuddin Hamapu, “17 Tahun Curi Ikan Di Laut Natuna, 2 Kapal Berbendera Vietnam Ditangkap,” detik.com, October 25, 2023.

kedaulatan negara. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman militer asing atau kekuatan bersenjata dalam negeri seperti konflik terbuka, perang konvensional, separatisme, infiltrasi, intelijen, spionase, hingga pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut, dan udara.<sup>6</sup> Dari fenomena tersebut, fakta penting yang tidak terbantahkan adalah bahwa terdapat kelemahan dalam pengamanan di wilayah perbatasan Kepulauan Riau, sehingga terjadi penyusupan kapal beserta awak kapal yang tidak diketahui oleh aparat petugas pengaman perairan. Selain mayoritas wilayah Kepulauan Riau adalah perairan atau laut, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki wilayah daratan yang luasnya sekitar 8.201,72 Km<sup>2</sup>.<sup>7</sup> Dengan jumlah kekuatan personel dan Alutsista yang dimiliki Korem 033/WP saat ini, dirasa belum cukup untuk mengawasi seluruh wilayah daratan Kepri.

Satuan Korem 033/Wira Pratama memiliki Satuan tempur yakni Yonif 136/Tuah Sakti. Keberadaan Yonif 136/Tuah Sakti terbilang penting sebagai pasukan berkualifikasi Raider untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan Kepri, bekerjasama dengan Kodim 0316/Batam serta mendukung tugas pokok Korem 033/Wira Pratama. Namun hingga saat ini, jumlah kesiapan operasional personel Yonif 136/TS masih berada di bawah 80%. Burky dan Perry menyebutkan "bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan utuh yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama".<sup>8</sup> Jika dikaitkan dengan teori tentang organisasi tersebut, jumlah

personel Yonif 136/Tuah Sakti sangat penting untuk dipenuhi hingga mencapai 90-95% dari TOP agar dapat berfungsi secara optimal melaksanakan tugas dan peran-perannya. Selain itu, untuk memaksimalkan performa personel Yonif 136/TS dalam melaksanakan tugas pokoknya, perlu diikuti dengan penyesuaian alkap serta alutsista khusus dan penambahan pembangunan infrastruktur, berupa pangkalan militer tingkat Kompi, mengingat kompi-kompi tersebar di 3 pulau, yaitu Batam, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai karimun.

Dalam hal alutsista khusus, Yonif 136/Tuah Sakti saat ini memiliki kendaraan tempur (Ranpur) Tank Amfibi Arisgator. Tank Amfibi Arisgator ini dikembangkan oleh perusahaan industri pertahanan asal Italia, ARIS (*Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali*). Dilansir dari laman resmi tniad.mil.id, tank amfibi Arisgator memiliki kecepatan maksimum sebesar 6 knot km/jam. Jika digunakan di darat tank amfibi arisgator tersebut bisa dipacu hingga 60 km/jam dan menempuh jarak lebih dari 500 km. Dari sisi persenjataan, tank amfibi Arisgator ini dibekali dengan senapan mesin M2HB atau pelontar granat 40mm Mk19 Mod 0. Selain itu, tank arisgator juga merupakan modifikasi dari tank angkut pasukan militer M113.



Gambar 1. Tank Arisgator, Alat Tempur TNI di Laut Terbuka, Sumber: Militer.id

Tidak hanya itu, tank tersebut bisa digunakan di darat dan di laut terbuka serta memiliki kemampuan

<sup>6</sup>Adi Briantika, "Rapim Kementerian Pertahanan 2022 Bahas Ancaman Keamanan Negara," tirtoid, accessed October 30, 2023, <https://tirtoid/rapim-kementerian-pertahanan-2022-bahas-ancaman-keamanan-negara-gnWo>.

<sup>7</sup>"Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau," accessed October 30, 2023, <https://kepri.bps.go.id/indicator/153/238/1/luas-daratan-provinsi-kepulauan-riau-menurut-kabupaten-kota.html>.

<sup>8</sup>Shahid J. Burky, Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, 1998, Beyond the Center: Decentralizing the State, Washington D.C, The World Bank, hlm. 26

bermanuver yang sangat mudah dalam pengendalian, bahkan bisa berputar di sumbu vertikal. Kemampuan lainnya yaitu menunjukkan profil yang rendah di atas air, bisa dengan mudah diluncurkan, balik kembali maupun disimpan oleh kapal landing platform dock (LPD). Arisgator juga dilengkapi dengan torrent untuk 12,7 HMG atau 40 mm AGL dengan remote control, ballistic computer dan juga peralatan sensor lainnya (night vision system, video-camera, laser range finder dan sebagainya). Menariknya lagi, proteksi tank tersebut bisa menahan tembakan 7,62 mm AP (armour piercing) pada jarak lurus 30M. Dengan spesifikasi yang dimilikinya, tank amfibi Arisgator siap untuk mempertahankan wilayah perairan Indonesia serta diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi laut, sungai dan pantai.<sup>9</sup> Namun kondisi saat ini, penggunaannya belum maksimal karena belum memiliki panduan (Buku Petunjuk) serta program latihan yang sesuai. Selain itu, kursus untuk mengawaki Arisgator belum banyak dilaksanakan sehingga para prajurit yang berkualifikasi sebagai awak Arisgator cukup terbatas.

Disamping Arisgator, wilayah Kepri memerlukan kendaraan lapis baja jenis APC (Armored Personnel Carrier) yang sesuai untuk medan perkotaan. Menilik dari tipologi wilayah, wilayah Kepri memiliki infrastruktur yang tergolong maju dengan banyak jalan raya. Kondisi ini mirip seperti kondisi di Jakarta, sehingga diperlukan APC roda ban seperti Anoa yang dapat membantu mobilitas dan perlindungan serta meningkatkan daya gempur pasukan di medan perkotaan. Anoa 6x6 APC adalah generasi pertama kendaraan tempur dari PT Pindad (Persero) yang memiliki keunggulan dalam mobilitas, proteksi serta daya angkut. Anoa 6x6 APC memiliki rasio daya berat 25 HP/ton, serta dilengkapi dengan sistem komunikasi dan transmisi otomatis. Anoa tipe APC memiliki

kapasitas 12 orang personel termasuk pengemudi. Memiliki top speed 80 km/h pada jalan raya dengan daya jelajah 600 kilometer. Beberapa spesifikasi Anoa diantaranya memiliki Weapon System : Smoke Grenade Dischargers : cal. 66 mm; (3 right, 3 left) Turret - Elevation : -10° s.d +45° - Rotation : 360° - Operation : Manual.<sup>10</sup>



Gambar 2. Anoa 6x6 APC (Armored Personnel Carrier),  
Sumber : Pindad.com

Munculnya Alutsista berteknologi tinggi dan modern, beberapa dekade terakhir ini telah mengubah metode dan strategi pasukan tempur dalam pertempuran. Teknologi modern membawa perubahan yang sangat signifikan, dengan demikian untuk mewujudkan Satuan TNI AD di wilayah perbatasan, selain satuan tempur maka peran dari pada Satuan Komando Kewilayahan juga sangatlah penting. Korem 033/Wira Pratama membawahi 4 Satuan Kodim yang tersebar di wilayah Kepulauan Riau. Fungsi utama dari pada Kodim salah satunya adalah menyusun dan menyiapkan ruang untuk digunakan dalam penyelenggaraan pertempuran di darat, sehingga dapat di implementasikan untuk Satuan Kodim adalah pasukan darat yang harus memiliki kemampuan Cyber, sehingga dapat memberikan informasi valid tentang ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas wilayah perbatasan. Teori Sun Tzu (Sun Tzu, diterjemahkan oleh Giles: 2000), strategi yang dapat digunakan untuk menangkal ancaman tersebut adalah melalui 'deception' seperti apa yang dijabarkan oleh Sun Tzu. "Melakukan yang sebaliknya dari apa yang diharapkan, mengetahui kelemahan lawan, dan

<sup>9</sup> nst, "Mengenal Kecanggihannya Tank Amfibi Arisgator Milik TNI AD - Indonesiadefense.com | Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini Hankam Dan TNI %," Indonesiadefense.com | Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini Hankam Dan TNI, June 12, 2022, <https://indonesiadefense.com/mengenal-kecanggihannya-tank-amfibi-arisgator-milik-tni-ad/>

<sup>10</sup> "PT. Pindad (Persero) - Anoa 6x6 APC (Armoured Personnel Carrier)," accessed October 31, 2023, <https://pindad.com/anoa-6-x-6-apc>.

m e n g a c a u k a n strateginya adalah bentuk pertahanan terhadap ancaman musuh".<sup>11</sup> Ini merupakan teori yang dapat menjadi acuan dalam menyusun dan menyiapkan strategi dalam menangkal suatu ancaman di wilayah perbatasan.

Satuan setingkat

Kodim di wilayah perbatasan harus memiliki perlengkapan siber, sehingga dapat terbentuk tim siber yang secara mandiri dapat mengakses dan cegah dini terkait informasi-informasi yang bisa saja merupakan kejahatan siber (cyber crime) ataupun serangan siber (cyber attack), sehingga mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Tim Cyber di Satuan setingkat Kodim, dalam konteks menjaga keamanan di wilayah perbatasan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Cyber Defense (Pertahanan siber), yaitu suatu upaya untuk menanggulangi serangan siber yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara.<sup>12</sup> Adapun jenis alat keamanan siber berdasarkan domain/bidang tertentu, diantaranya informasi keamanan dan alat manajemen acara, alat penilaian kerentanan, alat forensik digital, alat uji penetrasi, alat firewall, alat IDS /IPS, alat manajemen akses istimewa, alat deteksi dan respons titik akhir, alat deteksi dan respons jaringan, alat keamanan email, alat pencegahan kehilangan data. Semua alat ini akan memberikan gambaran bagaimana penyerang menggunakan alat tersebut untuk menemukan kerentanan dan dengan kerentanan yang ditemukan, bagaimana mereka melakukan penetrasi ke dalam jaringan untuk mendapatkan keuntungan dari data atau informasi pengguna.<sup>13</sup>



Gambar 3. Alat Keamanan Cyber Teratas, Sumber : knowledgehut.com

Dari kondisi ini jelas bahwa beragam teknologi saat ini diciptakan untuk membantu meningkatkan kemampuan Satuan TNI AD di wilayah perbatasan. Di Satuan Korem 033/Wira Pratama, usaha-usaha untuk memodernisasi alat perlengkapan militer sangat perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai konflik dan potensi ancaman baik di dalam dan luar negeri. Selain tim siber yang harus dimiliki oleh Satuan setingkat Kodim, Satuan tempur tingkat Yonif di wilayah perbatasan perlu juga adanya alutsista yang memiliki teknologi modern. Alutsista yang tepat dan cocok dengan karakter Satuan tempur di wilayah perbatasan, dengan kondisi saat ini, yaitu drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicles). Alutsista ini diperlukan sebagai alat bantu untuk melakukan tugas-tugas pengintaian, deteksi dini, spotting, observasi wilayah dan penjelajahan. Dalam beberapa jenis drone, dapat pula ditambahkan fitur video recording dan GPS sehingga apabila melihat sasaran/musuh/ bangunan dapat diinformasikan koordinat posisinya kepada pasukan Infanteri dengan cepat. Selain itu drone atau UAV dapat digunakan untuk pemantauan di wilayah perbatasan. UAV memungkinkan pemantauan yang efisien di wilayah yang luas.

Adaptasi terhadap alutsista modern memerlukan kesiapan dari sisi SDM, karena tanpa SDM yang sesuai/mumpuni, alutsista hanyalah benda mati yang tidak bisa digunakan. Dandim berperan aktif untuk membina satuan dan personelnya untuk menyiapkan SDM satuan agar siap dan kompatibel dengan Alutsista yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melaksanakan penataran intensif kepada anggota dengan mendatangkan tenaga ahli dari pusat terhadap Alutsista baru di lingkungan TNI AD, terutama alat perlengkapan siber dan drone atau UAV. Sedangkan Alutsista tambahan berupa ranpur APC awak ranpur juga harus melaksanakan Penataran tentang cara mengoperasikan ranpur tersebut. Ini bertujuan mengenalkan, melatih dan membiasakan anggota menggunakan dan mengoperasikan alutsista tersebut, sehingga prajurit baik yang berada di Kodim maupun di Yonif, selalu siap menghadapi dinamika terhadap perkembangan situasi. Kedua, menggunakan Alutsista tersebut sesering mungkin baik pada saat mengikuti latihan program maupun latihan pemeliharaan. Ketiga, memberikan kursus terbatas Bahasa Inggris dalam rangka meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris karena alutsista yang baru mayoritas menggunakan Bahasa Inggris sebagai pengantar dalam buku petunjuknya. Seluruh langkah tersebut bertujuan untuk menyiapkan SDM prajurit agar selalu siap menghadapi perkembangan situasi dan ancaman di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

Kekuatan siber militer yang ideal di wilayah perbatasan Kepulauan Riau sangat penting dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan stabilitas di wilayah ini. Dengan investasi yang tepat dalam personel dan peralatan militer, serta dengan fokus pada teknologi canggih dan kerja sama regional, TNI AD dapat mengatasi ancaman dan tantangan

yang ada. Pemberdayaan kekuatan dan strategi militer TNI AD, Korem 033/Wira Pratama di wilayah perbatasan Kepulauan Riau sangat penting untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan stabilitas di wilayah tersebut. Melalui investasi dalam personel, peralatan, teknologi, dan kerja sama regional, TNI AD dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang ada. Dengan demikian, wilayah perbatasan Kepulauan Riau akan tetap aman dan menjadi bagian penting serta menjadi bagian integral dalam pertahanan nasional Indonesia.

Dalam hal mewujudkan kekuatan militer TNI AD, Korem 033/Wira Pratama yang ideal sebagai penjaga keamanan wilayah perbatasan Kepulauan Riau, disarankan kepada komando atas:

1. Pengkajian ulang dan pembaharuan doktrin-doktrin tentang pelibatan kendaraan tempur dalam latihan taktik militer maupun tugas operasi di daerah konflik maupun di wilayah perbatasan.
2. Proses pengadaan alutsista dengan teknologi modern harus melalui pengkajian dan testing di satuan sehingga betul-betul diuji dan dicoba dan berdaya guna efektif.
3. Alutsista Infanteri yang dipilih harus sesuai dengan doktrin Sishankamrata dan tipologi wilayah Indonesia.
4. Membuat buku petunjuk taktik drone atau UAV.

Demikian gagasan demi mewujudkan Satuan TNI AD di wilayah perbatasan yang adaptif dan selalu siap dalam menghadapi segala kerawanan dan ancaman di wilayah perbatasan khususnya di Kepulauan Riau. Semoga bisa memberikan manfaat dan berguna bagi Satuan TNI AD Korem 033/Wira Pratama beserta jajaran, sehingga selalu siap untuk menghadapi potensi kerawanan dan ancaman di wilayah perbatasan.

# AKUNTABILITAS DUKUNGAN LOGISTIK BEKANG DALAM MEWUJUDKAN KESIAPAN OPERASIONAL TNI AD



*“Strategi dan taktik memberikan pola penyelenggaraan operasi militer, sedangkan logistik menyediakan sarannya”*

**P**usat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Pusbekangad) adalah badan pelaksana pusat di bawah markas besar TNI Angkatan Darat dengan tugas utama melaksanakan pembinaan kecabangan, pembinaan personel serta melaksanakan dukungan logistik dan angkutan untuk mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Pusbekangad memainkan peran sentral dalam melaksanakan pembekalan logistik dan angkutan dalam mewujudkan kesiapan operasional TNI AD. Pusbekangad memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyediaan, distribusi dan pengelolaan berbagai jenis bekal dan materiel (Bekmat) yang diperlukan oleh satuan. Bekmat yang menjadi lapangan kekuasaan teknis (LKT) Pusbekangad meliputi bekal makanan, bekal perminyakan, bekal kaporlap, bekal alsatri dan dukungan materiel angkutan khususnya angkutan darat dan angkutan air. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Pusbekangad berperan penting dalam memastikan ketersediaan, distribusi Bekmat serta dukungan angkutan untuk mendukung operasional TNI Angkatan Darat. Namun dalam kenyataannya Pusbekangad dalam



**OLEH : LETKOL CBA (K) EDZA FERASARI WINDA, S.E., M.M.  
(KABAGADAALSATRI/ATK-G BALAKADA  
PUSBEKANGAD)**

melaksanakan dukungan Bekmat kepada satuan pemakai belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya kualitas dan kuantitas Bekmat yang tersedia, tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi, serta adanya permasalahan administrasi dan akuntabilitas. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan, ketidaksesuaian atau bahkan kekurangan dalam penyediaan dan penyaluran Bekmat kepada satuan-satuan pemakai. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap kinerja, kualitas dan profesionalisme TNI AD dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu

perlu adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen logistik di Pusbekangad

Menurut pakar strategi perang yaitu Baron Antoine Henry Jomini yang menyebutkan bahwa Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran, akan tetapi tanpa logistik, pertempuran tidak akan dapat dimenangkan. Untuk itu kesiapan operasi TNI AD merupakan salah satu faktor kunci dalam menjamin keberhasilan tugas dan tanggung jawab TNI AD dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Kesiapan operasi TNI AD dapat dicapai dengan memiliki dukungan logistik bekal dan angkutan (Bekang) yang memadai tepat dan efisien yang dapat memenuhi kebutuhan materiel dari satuan-satuan TNI AD, baik dalam kondisi damai maupun perang. Pusbekangad bergerak di bidang penyediaan bekal dan angkutan bagi satuan-satuan TNI AD memiliki potensi dan kapasitas untuk melakukan pengembangan manajemen logistik.

**Manajemen logistik berdampak meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian bekal dan materiel di Pusbekangad.**



Manajemen logistik adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian guna mencapai tujuan yang utama. Dengan banyaknya pembina materiel di lingkungan TNI AD serta beragamnya kegiatan logistik

yang dilaksanakan perlu dibuat suatu mekanisme untuk mengatur rangkaian kegiatan logistik agar dapat berjalan dengan baik, efisien dan akuntabel. Rangkaian kegiatan tersebut tergambar dalam suatu siklus, yakni siklus logistik TNI AD. Siklus logistik TNI AD dapat diartikan sebagai suatu bentuk rangkaian perputaran kegiatan yang disusun dalam bentuk skema yang masing-masing saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan serta pengawasan dan pengendalian. Proses manajemen logistik yang dilaksanakan oleh seluruh satuan di Pusbekangad terutama dalam distribusi bekal/materiel dapat lebih efektif dan efisien didistribusikan ke satuan pemakai. Dengan adanya peningkatan manajemen logistik di Pusbekangad akan tercipta dukungan logistik yang memadai, tepat dan efisien bagi satuan-satuan TNI AD, sehingga dapat meningkatkan kesiapan operasi TNI AD dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.



Manajemen logistik dalam militer merupakan jantung dalam kekuatan sistem pertahanan negara. Manajemen logistik yang efisien dapat memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kualitas bekal, mengurangi biaya operasional dan memperbaiki produktivitas. Manajemen logistik dapat didefinisikan sebagai bagian dari prosedur yang berguna untuk melaksanakan, mengendalikan dan

melakukan perencanaan yang efisien dari alur penyimpanan bekal dan materiel, pelayanan serta informasi dari titik awal distribusi hingga titik akhir distribusi. Semua proses akan tercatat dalam sistem yang jelas hingga mudah untuk dimonitor dan dikontrol. Fungsi-fungsi manajemen logistik merupakan serangkaian suatu proses yang terdiri dari fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan dan pendistribusian, fungsi pemeliharaan, fungsi penghapusan dan fungsi pengendalian. Dalam hal ini dapat dianalisa bahwa di Pusbekangad dengan adanya manajemen logistik yang matang akan memastikan bahwa bekal dan materiel disalurkan dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan jumlah yang tepat, untuk biaya yang tepat dan kualitas yang tepat. Sehingga perlu adanya manajemen logistik dalam melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan operasional tersebut. Selain itu pelaksanaan yang efisien dalam proses distribusi menjadi hal krusial sehingga mengakibatkan pemenuhan logistik satuan-satuan TNI AD sebagai satuan pemakai.

Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen logistik di Pusbekangad dalam distribusi bekal dan materiel dapat dilakukan: 1) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan logistik, khususnya untuk pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian materiel. Program kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan TNI AD serta melakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, efisien dan akuntabel. 2) Meningkatkan administrasi dan akuntabilitas dalam proses logistik, khususnya dalam hal pendistribusian bekal/materiel. Dengan menerapkan standar dan prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat, perlu adanya peningkatan transparansi, validitas, reliabilitas data dan informasi

mengenai proses logistik, pencegahan serta penindakan terhadap potensi penyelewengan.

### **Pentingnya pengendalian dalam pengelolaan logistik guna mewujudkan sistem administrasi yang akuntabel dan terintegrasi.**



Pengendalian adalah suatu proses yang meliputi pengukuran, evaluasi dan koreksi kinerja suatu kegiatan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian yang efektif dan efisien dapat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan, mengurangi risiko kesalahan serta memperbaiki produktivitas. Pengendalian juga melibatkan penggunaan teknologi informasi secara akurat, cepat dan mudah. Pengendalian di Pusbekangad dalam mengelola logistik yang akuntabel dan terintegrasi, dilakukan diantaranya: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengendalian logistik, khususnya dalam teknologi informasi, administrasi dan akuntabilitas. Dengan mengadakan pelatihan, pendidikan dan sertifikasi yang relevan serta memberikan penghargaan bagi prajurit yang berprestasi. Selain itu perlu juga adanya peningkatan disiplin, integritas dan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 2) Peningkatan administrasi pergudangan dalam bentuk administrasi bekal Bekang (Prosmink Bekang), baik dokumen manual maupun komputerisasi perlu dilakukan. Proses pengelolaan dokumen dan data harus

diperbarui untuk memastikan ketertiban serta visibilitas. Untuk itu perlu adanya pengembangan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mengelola data dan informasi mengenai pengendalian logistik secara akurat, cepat dan mudah. Dalam hal ini pengembangan sistem informasi harus benar-benar terintegrasi dengan aplikasi SAKTI yang ada sehingga dapat membantu proses pengukuran, evaluasi dan koreksi kinerja logistik yang dilakukan oleh satuan pelaksana jajaran Pusbekangad.



Dalam penggunaan teknologi sistem aplikasi saat ini menggunakan sistem pendukung internal berbasis online bernama SAKTI (Sistim Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaraan dan Anggaran Negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel dan transparan. Pusbekangad telah menggunakan aplikasi SAKTI secara online sejak tahun 2022 semester II sesuai yang diberlakukan oleh Kemenkeu. Namun sistem ini belum dapat mengintegrasikan data dan informasi mengenai pengelolaan logistik yang meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan materiel. Pengelolaan informasi mengenai pengelolaan logistik terintegrasi secara efisien dalam pengelolaan logistik. Ketertiban administrasi pergudangan dengan menggunakan bentuk-bentuk administrasi bekal Bekang (Prosmink Bekang), baik dokumen manual

maupun secara komputerisasi. Dokumen administrasi yang masih digunakan dalam kegiatan pengelolaan pergudangan karena merupakan instrumen wajib yang harus ada untuk mendukung sebagai rekam catatan pergerakan keluar masuknya bekal/materiel dari dan ke gudang. Pengendalian yang dilakukan oleh Pusbekangad dalam mengelola logistik dapat lebih akuntabel dan terintegrasi serta dapat meningkatkan kesiapan operasional kesatuan TNI AD. Dengan adanya pengendalian yang optimal akan tercipta pengelolaan logistik yang transparan, valid, reliabel dan dapat mengurangi risiko dan kesalahan dalam proses logistik.

Doktrin logistik TNI AD sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor KEP/892/XIII/2021 mengatur secara umum tentang pokok-pokok, siklus, dan penyelenggaraan logistik TNI AD. Dalam doktrin logistik tersebut disebutkan salah satu siklus logistik adalah pengendalian yang merupakan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang ataupun sudah berlangsung dengan kegiatan berupa pemeriksaan materiel, administrasi dan pendataan logistik.

### **Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan pemenuhan dukungan bekal bekang kepada satuan pemakai.**



Dukungan bekal bekang yang dilakukan oleh satuan pelaksana Pusbekangad kepada satuan pemakai dengan metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan dukungan logistik dilaksanakan secara terpadu serta terarah

dikarenakan Pusbekangad sebagai pembina materiel bagi Kotama, Balakpus dan seluruh satuan jajaran TNI AD.



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses manajemen logistik yang dilaksanakan oleh satuan pelaksana di Pusbekangad terutama dalam distribusi bekal/materiel belum optimal. Kondisi ini dapat mengakibatkan pemenuhan logistik satuan-satuan TNI AD sebagai satuan pemakai. Pengendalian yang dilakukan oleh Pusbekangad dalam mengelola logistik yang akuntabel dan terintegrasi serta meningkatkan kesiapan operasional kesatuan TNI AD yang penggunaan teknologinya dengan sistem aplikasi online dan sepenuhnya menggunakan data ataupun informasi.



Dari kesimpulan yang disampaikan di atas, maka disarankan sebagai berikut:  
1) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan logistik, khususnya

untuk pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian materiel dengan mengusulkan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan TNI AD serta melakukan evaluasi dan audit secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, efisien dan akuntabel. 2) Peningkatan Administrasi Pergudangan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mengelola data dan informasi mengenai pengendalian logistik secara akurat, cepat dan mudah. Dalam hal ini pengembangan system informasi yang dilakukan harus benar-benar terintegrasi dengan aplikasi SAKTI yang ada sehingga dapat membantu proses pengukuran, evaluasi dan koreksi kinerja logistik yang dilakukan oleh satuan pelaksana jajaran Pusbekangad. 3) Membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari tiap Kotama, Balakpus dan seluruh satuan jajaran TNI AD yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana dukungan bekal bebang yang sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan ketersediaan sumber daya. Tim kerja ini dikoordinir oleh satuan pelaksana Pusbekangad ataupun satuan Bekangad di wilayah yang bertugas untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi secara rutin dan intensif untuk memastikan keselarasan, keterpaduan dan kesinambungan dalam perencanaan dukungan bekal Bekang.



# PEMBINAAN SATUAN DAN PRESTASI

**B**atalyon Infanteri 644/Walet Sakti merupakan salah satu Batalyon Infanteri di jajaran Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa Kodam XII/Tanjungpura. Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti berada di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Batalyon ini didirikan pada tahun 2009 dengan nama Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti, dan pada tahun 2016 diubah menjadi Batalyon Infanteri Raider Khusus 644/Walet Sakti dengan kekuatan personel 1039 orang. Kemudian pada bulan Mei tahun 2023 ditunjuk menjadi salah satu Batalyon yang melaksanakan uji coba Orgas Tahun 2022 dengan kekuatan personel 700 orang. Sejak bulan Juli 2022 sampai saat ini, Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti dipimpin oleh Letkol Inf Benu Supriyantoko, S.H. merupakan alumni dari Akademi Militer Tahun.2004 dan saat ini merupakan Danyon ke-9 sejak Batalyon



**OLEH : LETKOL INF BENU SUPRIYANTOKO, S.H.  
(DANYONIF RK 644/WALET SAKTI BRIGIF 19/  
KATULISTIWA KODAM XII/TANJUNGPURA)**

Infanteri 644/Walet Sakti berdiri. Sebelum menjabat Danyonif 644/Walet Sakti, Letkol Inf Benu Supriyantoko, S.H. bertugas di Staf operasi Kodam sebagai Pabandyalat Sopsdam XII/Tanjungpura.



Pembinaan satuan di lingkungan TNI AD pada hakikatnya untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan satuan guna melaksanakan tugas pokok dengan melakukan pembinaan di bidang organisasi, personel, materiel, pangkalan, peranti lunak dan latihan serta didukung dengan anggaran yang memadai.<sup>1</sup> Sehingga dalam pelaksanaan pembinaan satuan, seorang komandan batalyon menurut

<sup>1</sup> Bujuklak Binsat TNI AD No: Skep / 542 / XII / 2006 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan

penulis dituntut untuk memiliki tiga dasar, yaitu memiliki ide-ide kreatif, keberanian, dan rela berkorban. Ketiga hal tersebut sangat diperlukan dan menjadi modal dasar dalam melaksanakan tugas sebagai komandan batalyon infanteri.

Mengapa seorang komandan batalyon harus kreatif? Barron dan Harrington (1981) berpendapat bahwa pemimpin dengan kepribadian kreatif dan terbuka akan mempengaruhi kreativitas organisasi yang mereka bawa.<sup>2</sup> Menurut Gough (1979), pemimpin kreatif cenderung terbuka terhadap pengalaman baru dan tidak konvensional. Mereka juga percaya diri, terdorong, ambisius, dominan, dan impulsif. Menurut McCrae dan Costa (1997), individu yang memiliki keterbukaan tinggi akan menghargai ide dan imajinasi yang tidak biasa, ingin tahu, dan berpikiran luas, dan sebagai ragam pengalaman. Sebaliknya, individu yang rendah keterbukaan akan lebih konvensional, memiliki minat tradisional dan lebih menyukai keakraban daripada hal baru. Dari sedikit uraian tersebut diatas dapat menggambarkan bahwa dalam membawa satuan tempur yang terdiri dari prajurit-prajurit muda membutuhkan seorang komandan batalyon yang memiliki ide-ide kreatif dalam mengajak prajuritnya agar mau mengikuti keinginan Komandan dalam mencapai tugas pokok satuan dengan ikhlas dan bertanggungjawab, hal ini dapat kita ambil contoh pada pelaksanaan lari. Satuan tempur dituntut untuk siap operasional, diantaranya prajurit harus memiliki fisik prima, sehingga salah upaya pembinaannya adalah dengan melaksanakan olah raga lari. Seorang

komandan batalyon yang kreatif akan mengajak lari anggotanya dengan berbagai cara seperti, lari erobik di dalam asrama, lari 5km dengan keluar satuan, lari setelah upacara bendera dengan tanpa kaos, dan lari dengan menggunakan PDL kaos bersenjata. Inti dari lari adalah untuk membuat prajurit agar memiliki fisik prima, namun seorang komandan batalyon yang kreatif dapat mengemas berbagai cara lari agar prajurit tidak bosan dan ikhlas dan melaksanakan perintah yang diberikan.

Sedangkan berkaitan dengan keberanian, sejarawan dari Universitas Indonesia Anhar Gonggong mengatakan seorang pemimpin harus berani melampaui dirinya, yang berani berarti dia siap untuk menderita demi kesejahteraan anggotanya.<sup>3</sup> Satu hal yang sangat penting harus dimiliki seorang pemimpin adalah keberanian.<sup>4</sup> Artinya seorang pemimpin yang baik harus berani mengambil risiko demi mencapai tujuannya, tanpa kepastian sukses atau tidaknya usahanya itu. Karena di dalam hidup dan usaha tidak ada yang pasti, maka setiap komitmen dan aksi yang dibuat pemimpin dibutuhkan keberanian. Dari sedikit gambaran yang berkaitan dengan keberanian, seorang komandan batalyon



<sup>2</sup> <https://news.unair.ac.id/2020/11/08/membentuk-perilaku-kreatif-pemimpin-untuk-meningkatkan-kreativitas-organisasional/?lang=id>

<sup>3</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/514776/sejarawan-seorang-pemimpin-harus-berani-melampaui-dirinya>

<sup>4</sup> <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/apa-yang-membuat-seorang-pemimpin-menjadi-good-leader/>



harus berani mengambil keputusan dalam setiap kegiatan dan kondisi. Hal tersebut dapat kita contohkan dalam pemberian *reward* dan *punishment*, hal seperti ini terlihat sepele atau kecil, namun sangat berarti bagi seorang prajurit. Misalnya apabila seorang anggota batalyon dapat berprestasi/memenangkan pertandingan, maka seorang komandan batalyon harus berani memberi *reward* bagi anggota yang berprestasi tersebut. *Reward* tidak semata-mata berupa uang (materi), namun dalam hal ini seorang komandan batalyon harus berani memberi *reward* berupa libur bagi prajurit yang berprestasi tersebut. Mengapa seorang komandan

batalyon memberi libur prajurit yang berprestasi saja disebut berani? Karena dalam keberanian membuat kebijakan memberi libur mengandung beberapa kemungkinan resiko yang ada, diantaranya saat berlibur mengalami kecelakaan, atau melakukan perkelahian. Hal tersebut mungkin saja terjadi, sehingga disini keberanian seorang komandan batalyon diuji. Sebagai seorang Komandan tidak perlu takut dengan kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi, kita harus yakin bahwa mereka adalah prajurit yang berprestasi, sehingga layak diberi hadiah libur dan mereka pasti berusaha menjaga kebanggaan/prestasi yang telah mereka dapatkan dengan perjuangan.



Selanjutnya berkaitan dengan rela berkorban, seorang pemimpin harus bisa melihat hal-hal yang menjadi prioritasnya. Pemimpin harus bisa mendahulukan apa yang penting, dan tentunya terdapat hal-hal yang harus dikorbankan ketika memprioritaskan sesuatu. Kita harus yakin, bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan akan

sangat berharga dan berarti, dengan harapan pengorbanan yang dilakukan dapat membawa pengaruh yang baik dan adanya peningkatan kualitas satuan. Dari gambaran singkat yang berkaitan dengan rela berkorban tersebut di atas, dapat diartikan bahwa untuk menjadi seorang komandan batalyon tidak boleh lagi memiliki permasalahan pribadi yang perlu diselesaikan, seorang komandan batalyon hanya boleh berfikir tentang anggotanya dan bagaimana menyelesaikan permasalahan di satuannya. Mengapa demikian? Karena bila seorang komandan batalyon masih memiliki masalah pribadi yang belum selesai, bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan anggota dan Satuannya. Disinilah seorang komandan batalyon dituntut untuk rela berkorban dengan memprioritaskan kepentingan anggota atau Satuan yang dia pimpin daripada kepentingannya sendiri atau keluarganya. Namun sebagai seorang komandan batalyon kita tidak perlu takut, kita harus yakin bahwa dengan kita memprioritaskan kepentingan anggota, maka mereka akan memberikan respon positif dan dengan demikian anggota di Satuan kita tidak akan membuat pelanggaran, karena malu bila masih merepotkan komandan batalyonnya. Malah akan sebaliknya, mereka akan membuktikan bahwa mereka juga rela berkorban demi komandan dan Satuannya, sehingga prestasi-prestasi akan semakin bermunculan dan membawa nama baik Satuan yang kita pimpin. Contoh kecil dari rela berkorban seorang komandan batalyon diantaranya pada saat malam hari, seorang komandan

harus mau keluar rumah dan bergabung dengan anggotanya yang ada di barak remaja, maupun bergabung dengan anggotanya yang mungkin sedang duduk-duduk santai didepan teras rumah mereka. Mengapa hal demikian disebut termasuk rela berkorban? Karena bila seorang Komandan Batalyon tidak memprioritaskan anggotanya, pasti dia akan lebih memilih berkumpul dengan keluarganya di rumah atau malah jalan-jalan ke kota dengan anak dan istrinya.

Dari beberapa uraian singkat tersebut di atas, yang meliputi ide-ide kreatif, keberanian dan rela berkorban, tentu bukan hal mudah bagi seorang komandan batalyon mewujudkan hal tersebut. Rata-rata seorang komandan batalyon menjabat antara 1,5 th sampai 2 tahun. Selama kurun waktu tersebut seorang komandan batalyon harus benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Diawal telah kita sampaikan bahwa Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti berada di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, jarak antara Batalyon Infanteri 644/Walet dengan Markas Brigif 19/Kh yang berkedudukan di Singkawang adalah kurang lebih 661 Km dengan waktu tempuh rata-rata 14 Jam, sedangkan jarak antara Batalyon Infanteri 644/Walet dengan Markas Kodam XII/Tpr adalah kurang lebih 591 Km dengan waktu tempuh rata-rata 12 Jam. Dengan jarak yang cukup jauh dari Satuan Induk dan di umur Batalyon yang baru berusia 14 tahun, bukan menjadi hambatan bagi Batalyon Infanteri 644/Walet untuk berprestasi, hal ini terbukti dengan beberapa keberhasilan Batalyon Infanteri 644/Walet dalam kurun waktu 1.5 tahun terakhir ini dengan mendapatkan juara dalam berbagai perlombaan/pertandingan yang diadakan baik oleh Kodam XII/Tpr maupun oleh Pemerintah Daerah. Beberapa prestasi yang telah diraih dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh Kodam XII/Tpr diantaranya Juara 1 Lomba Peleton Beranting Satuan Jajaran Kodam



XII/Tpr tahun 2022, Juara 1 Lomba Joget Komando Satuan Jajaran Kodam XII/Tpr tahun 2023, Juara 2 Lomba Sparko Satuan Jajaran Kodam XII/Tpr tahun 2022, Juara 2 Lomba renang Satuan Jajaran Kodam XII/Tpr tahun 2022, dan Juara 3 Lomba regu tangkas Satuan Jajaran Kodam XII/Tpr tahun 2023. Sedangkan beberapa prestasi yang berhasil diraih dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya Juara 1 Lomba Bola Voli Piala Ketua DPRD Cup Se Kapuas Hulu tahun 2022, Juara 1 Pencak Silat Kelas H Piala Bupati Kubu Raya tahun 2023, Medali Emas Tinju Porprov XIII Kalbar tahun 2023, Juara 1 Sepak Bola Se Kecamatan Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu tahun 2022, dan Juara 3 Sepak Bola Se Kab. Kapuas Hulu tahun 2023.



**Manalo Marajuang, Selalu Menang Dalam Berjuang!** Merupakan semboyan prajurit Walet Sakti. Setiap prajurit wajib hafal dan memahami serta mengamalkan Mars, Hymne dan Janji Prajurit Walet Sakti. Dengan memiliki pedoman, maka setiap prajurit Walet Sakti mempunyai pegangan yang dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam bersosialisasi di masyarakat maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sehingga dari seluruh uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk menjadi Satuan yang berprestasi, Batalyon Infanteri 644 Walet Sakti memiliki tantangan yang cukup besar, yaitu jarak tempuh yang cukup jauh dari Satuan Induk serta usia Batalyon yang relatif masih muda. Namun dengan Pembinaan Satuan dan Kepemimpinan yang tepat dari seorang Komandan Batalyon dalam kurun waktu 1.5 tahun terakhir, dapat menghasilkan berbagai prestasi baik di Jajaran Kodam XII/Tpr, maupun di Masyarakat.



# PERUBAHAN NOMENKLATUR ASPAM KASAD MENJADI ASINTEL KASAD

**K**emajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibawa oleh globalisasi ternyata menimbulkan ancaman bagi suatu negara termasuk Indonesia. Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan kekuatan militer yang dimiliki oleh Republik Indonesia harus mampu menghadapi dinamika lingkungan strategi global dan regional. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, Tentara Nasional Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Dalam rangka menghadapi perkembangan dinamis di tingkat global, regional, dan nasional, TNI terus melakukan transformasi didalam tubuhnya seperti perubahan organisasi untuk memastikan kesiapannya dalam menjalankan misi perlindungan dan pelayanan kepada rakyat.

Berlandaskan Perpres Nomor 62 Tahun 2016 berisi tentang susunan organisasi TNI termasuk didalamnya organisasi TNI AD. TNI AD harus senantiasa mampu menjawab setiap tuntutan tugasnya secara efektif, efisien dan akuntabel. Dihadapkan pada tuntutan tugas yang akan dihadapi kedepan, penataan suatu organisasi tentunya akan selalu mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta kinerja satuan. Penataan organisasi jajaran TNI Angkatan Darat merupakan salah satu kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat sebagai wujud pengembangan gelar kekuatan. Dihadapkan pada tuntutan tugas yang akan dihadapi kedepan, penataan suatu organisasi tentunya akan selalu mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta kinerja satuan.



**OLEH : MAYOR KAV ROLLAN DJUNAEDI, S.H., M.I.P.  
(PABANDA PERTAHANAN SPABAN III/BIDDAGRI SINTELAD)**

Staf Pengamanan TNI Angkatan Darat (Spamad) adalah eselon pembantu pimpinan di tingkat Mabasad yang dipimpin oleh Aspam Kasad merupakan bagian dari Organisasi TNI Angkatan Darat. Organisasi dan tugas Spamad berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 37 Tahun 2016 tentang Orgas Spamad tanggal 25 November 2016 secara umum sudah dapat dilaksanakan dalam bidang pengamanan tubuh TNI Angkatan Darat, namun demikian dalam pembinaan fungsi intelijen satuan jajaran dan antisipasi perkembangan situasi belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan peran dan fungsi intelijen. Mencermati kondisi tersebut dan dihadapkan pada tanggung jawab dan beban tugas yang semakin tinggi serta kompleks maka organisasi dan tugas Spamad dilaksanakan perubahan nomenklatur atau validasi menjadi Sintelad.



# RAPAT EVALUASI BIDANG INTELIJEN SEMESTER I TA 2023

Jakarta, 12 Juli 2023

Foto Bersama Pejabat Intelijen TNI AD TA 2023

Maksud dari penyusunan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang perubahan nomenklatur Orgas Spamad menjadi Sintelad kepada seluruh jajaran TNI AD, sedangkan tujuannya agar perubahan ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas khususnya fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Orgas Spamad dalam pelaksanaan tugas dimasa sekarang harus mampu bersifat adaptif menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Untuk dapat mewujudkan organisasi dan tugas Spamad yang profesional, efektif dan modern, perlu mengetahui pokok-pokok permasalahan yang ada. Pokok-pokok permasalahan yang timbul dalam orgas Spamad tersebut meliputi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, kemampuan dan batas kemampuan dan struktur organisasi. Referensi yang dapat dipedomani : a) Perpres Nomor 62 Tahun 2016 berisi tentang susunan organisasi TNI; dan b) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/68/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Intelijen.

## Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 37 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tugas Staf Umum Pengamanan Angkatan Darat, disingkat Orgas Spamad adalah Eselon Pembantu Pimpinan di tingkat Mabasdad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad. Rumusan tersebut belum sesuai dengan fungsi Intelijen berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/68/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Intelijen yang berisi bahwa fungsi Intelijen tidak hanya melaksanakan fungsi pengamanan akan tetapi juga melaksanakan fungsi penyelidikan



Pembacaan Pakta Integritas Pejabat Intelijen TNI AD

dan penggalangan Apabila nomenklatur Spamad tidak dirubah sesuai aturan berlaku maka akan dapat menghambat kelancaran tugas Spamad dihadapkan dengan tuntutan tugas dan tantangan ke depan.

### Tugas Pokok.

Berdasarkan Perkasad Nomor 37 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tugas Staf Umum Pengamanan Angkatan Darat, Spamad bertugas pokok membantu Kasad dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Rumusan tersebut belum sesuai dengan rumusan tugas pokok pada fungsi pembinaan intelijen yang mencakup penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan persandian TNI Angkatan Darat pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/68/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Intelijen. Dengan dasar tersebut perlu dilakukan validasi organisasi dan tugas Spamad menjadi Staf Intelijen TNI Angkatan Darat sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok secara optimal, sesuai fungsi pembinaan Intelijen yaitu dalam hal penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan persandian, tentunya dalam tataran kebijakan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Apabila rumusan tugas pokok tersebut tidak diubah maka akan dapat menghambat kelancaran tugas Spamad dihadapkan dengan tuntutan tugas dan tantangan saat ini.

### Fungsi.

Orgas Spamad sesuai Peraturan Kasad Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tugas Staf Umum Pengamanan Angkatan Darat meliputi perencanaan, pengamanan personel, pengamanan materil, pengamanan



Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat Intelijen TNI AD

berita dan kegiatan, pembinaan intelijen, hubungan luar negeri, dan administrasi Intelijen. Rumusan tugas tersebut belum sesuai dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/68/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Intelijen. Dalam Bab IV Pembinaan Intelijen, sesuai dengan tatarannya, Asisten Pengamanan Kasad dalam hal ini Spamad, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan tugas satuan serta staf Intelijen di lingkungan TNI Angkatan Darat. Fungsi ini menjelaskan tentang definisi Pembinaan intelijen yaitu menyelenggarakan pembinaan dan kegiatan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan persandian TNI Angkatan Darat, dengan sistem dan metoda, taktik dan teknik intelijen. Perumusan tugas-tugas Orgas Spamad pada Peraturan Kasad Nomor 37 Tahun 2016 meliputi fungsi utama dan fungsi organik militer belum dapat menjabarkan tugas pokok Spamad sebagai eselon pembantu pimpinan di tingkat Mabasas yang berkedudukan langsung di bawah Kasad, sehingga apabila fungsi utama tersebut tidak dirumuskan ulang maka Spamad tidak dapat mendukung tugas Mabasas secara maksimal

## Kemampuan dan Batas Kemampuan.

Berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 37 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tugas Staf Umum Pengamanan Angkatan Darat (Spamad) pada struktur organisasi Spamad. Rumusan kemampuan dan batas kemampuan yang tercantum dalam Orgas Spamad saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan yang mengalir dari uraian kegiatan masing-masing fungsi utama dihadapkan dengan perkembangan tuntutan tugas. Sementara itu, rumusan batas kemampuan hanya mencakup batas kemampuan fungsi utama, namun dalam kenyataannya fungsi lainnya juga memiliki batas kemampuan. Sehingga apabila rumusan kemampuan dan batas kemampuan tidak disempurnakan maka kemampuan dan batas kemampuan yang ada tidak dapat menjadi tolak ukur pencapaian tugas pokok Spamad.



Rapat Evaluasi Bidang Intelijen Semester I TA 2023

## Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 37 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tugas Staf Umum Pengamanan Angkatan Darat. Penyebutan nama jabatan Paban sesuai dengan bidang masing-masing

pada Struktur Organisasi Spamad saat ini belum selaras dengan rumusan pembinaan Intelijen sebagaimana tercantum pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/68/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Intelijen. Dalam Bab IV Pembinaan Intelijen, sesuai dengan tatarannya, Asisten Pengamanan Kasad dalam hal ini Spamad, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi dan tugas satuan serta staf Intelijen di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dalam pelaksanaannya, Spamad melaksanakan validasi terhadap organisasi Intelijen dihadapkan dengan perkembangan situasi serta dinamika ancaman dan tuntutan tugas. Hal ini tercantum pada Bujukin Intelijen yang berbunyi, "Penyempurnaan organisasi Intelijen maupun persandian berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan situasi dihadapkan pada hakekat ancaman

maupun efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas". Perubahan nomenklatur pada struktur organisasi Spamad menjadi Paban I/Renintel, Paban II/Minintel, Paban III/Biddagri, Paban IV/Pam, Paban V/Inteltek, dan Paban VI/Hublu. Nomenklatur Paban III/Biddagri merupakan penjabaran dari salah satu fungsi utama pembinaan Intelijen yang diimplementasikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi bidang Ipoleksosbudmilhan. Sehingga adanya perubahan penyebutan nomenklatur jabatan tersebut maka struktur yang disusun akan menggambarkan dengan jelas tugas dan tanggungjawab Spaban di Sintelad.



**ASINTEL KASAD DR. JAKA TANDANG DAN IBU TATAT JAKA TANDANG**

Berdasarkan analisa terhadap pokok-pokok permasalahan di atas maka dilakukan upaya dalam rangka menyesuaikan dan memperkuat organisasi Spamad agar mampu menjawab perkembangan tuntutan tugasnya. Penyesuaian maupun penguatan tersebut tentunya dilakukan melalui penataan organisasi dan tugas dengan memedomani ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan Spamad dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokoknya. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang timbul dalam orgas Spamad adalah : Pertama, nomenklatur penyebutan Spamad diadakan perubahan menjadi Sintelad sesuai dengan pembinaan fungsi Intelijen untuk menyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan persandian TNI Angkatan Darat yang terdapat pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi. Kedua, merubah tugas pokok Spamad disesuaikan dengan rumusan tugas pokok sesuai

dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi yaitu membantu Kasad menyelenggarakan fungsi Staf Umum Angkatan Darat di bidang pengamanan meliputi pembinaan pengamanan dan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Intelijen dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Darat. Ketiga, menyusun perumusan tugas-tugas Orgas Spamad pada Peraturan Kasad Nomor 37 Tahun 2016 meliputi fungsi utama dan melaksanakan fungsi organik TNI Angkatan Darat disesuaikan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/184/II/2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi dan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/68/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk Intelijen. Keempat, merumuskan kemampuan dan batas kemampuan Spamad pada masa sekarang dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, merubah nomenklatur pada struktur organisasi Spamad menjadi Paban I/Renintel, Paban II/Minintel, Paban III/Biddagri, Paban IV/Pam, Paban V/Inteltek, dan Paban VI/Hublu disesuaikan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/184/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kartika Eka Paksi. Keenam, melakukan penyesuaian susunan organisasi pada eselon pembantu pimpinan yang masih belum sesuai sehingga dapat menjawab tuntutan tugas di bidang Intelijen khususnya pada kegiatan penyelidikan dan pembinaan Intelijen Teknik.

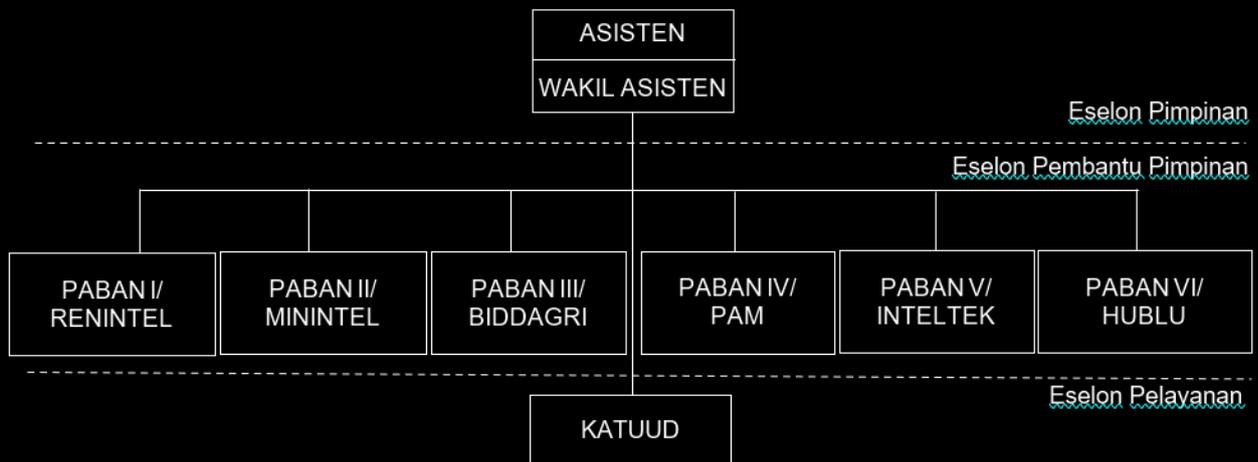
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan organisasi Spamad yang profesional, efektif, efisien dan modern, maka dilakukan penataan organisasi yang lebih baik berupa perubahan nomenklatur penyebutan Spamad menjadi Sintelad sesuai dengan pembinaan fungsi Intelijen untuk

menyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan persandian TNI Angkatan Darat serta diikuti perubahan rumusan Orgas Spamad meliputi kedudukan, tugas pokok, fungsi, kemampuan dan batas kemampuan, struktur organisasi dan susunan organisasi, sehingga mampu melaksanakan tugas secara optimal dan menjawab tantangan tugas di masa mendatang.

Untuk melengkapi upaya-upaya tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Pertama, perlu

adanya sosialisasi ke satuan jajaran TNI AD khususnya yang bergerak di bidang Intelijen terkait perubahan nomenklatur Spamad menjadi Sintelad sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penjabaran tugas. Kedua, melakukan evaluasi terhadap Orgas Sintelad yang sudah terbentuk dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan baru yang akan timbul sehingga dapat mengoptimalkan tugas Sintelad dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.

Struktur Organisasi Sintelad (berdasarkan Eselon dan Jabatan) yang berlaku saat ini:



# SATUAN PUSDIKLATPASSUS KOPASSUS TNI AD



OLEH : MAYOR INF WIRAHADY HARA  
(KABAGDIKLAT PUSDIKLATPASSUS KOPASSUS)

**K**opassus sebagai Kotama Pembina berkedudukan langsung di bawah Kasad dan Sebagai Komando Pelaksanaan Operasional berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI dengan tugas pokok membantu Kasad dalam membina fungsi dan kesiapan operasional pasukan khusus serta menyelenggarakan Operasi Komando, Operasi Sandha dan Operasi Penanggulangan Teror sesuai perintah Panglima TNI dalam rangka mendukung Tupok TNI.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang akan muncul tentunya kita harus melihat dari mana cikal bakal prajurit Kopassus itu dilahirkan, dan tentunya Pusdiklatpassus Kopassus merupakan kawah chandradimuka dan



tempat penggembleran bagi para prajurit Kopassus.

Adapun maksud dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang nama-nama sekolah, logo sekolah, jenis pendidikan serta lambang kualifikasi dari pendidikan yang dilaksanakan di satuan Pusdiklatpassus dengan tujuan agar pembaca dapat mengenal lebih dalam tentang satuan Pusdiklatpassus Kopassus TNI AD. Dalam ruang lingkup penulisannya sesuai dengan startifikasi Pendahuluan, Pembahasan dan diakhiri dengan Penutup. Agar memberikan koridor tulisan ini, penulis membatasi pembahasan dilingkup Satuan Pusdiklatpassus Kopassus.

Pusdiklatpassus Kopassus memiliki 6 eselon pelaksana pendidikan yang disebut dengan Sekolah. Berikut akan dibahas perihal nama-nama sekolah beserta brevet atau lambang kualifikasinya.

## Sekolah Komando.

Sekolah Komando yang dikenal sebagai "Ksatria Chandradimuka" memiliki makna suatu tempat penggembleran calon ksatria menjadi pribadi yang tangguh, kuat, dan terlatih. Di sekolah ini lah seorang prajurit TNI AD ditempa, dibina, dibentuk, dan dilatih sedemikian rupa menjadi prajurit yang menyandang baret merah dan berkualifikasi Komando.

### 1. Brevet kualifikasi Komando



a. Tulisan 'KOMANDO'. Sebagai tanda kualifikasi kemampuan Komando yang menunjukkan setiap prajurit yg menyandang brevet ini wajib memegang teguh janji prajurit Komando.

b. Kobaran Lidah Api. Semangat jiwa Komando selalu berkobar dan tidak akan pernah redup yang selalu siap menghancurkan setiap penghalang kedaulatan negara.

c. Jangkar. Menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan operasi di medan maritim baik sungai, rawa, dan laut.

d. Pisau Komando (3 uliran di gagang). Kemampuan operasi tempur dengan selalu memegang teguh 3 pasal Janji prajurit Komando dalam setiap tugasnya.

### 2. Brevet kualifikasi Kursus Pelatih Komando.



a. Tulisan 'PELATIH'. Menandakan bahwa penyandang brevet ini telah memiliki kualifikasi sebagai pelatih Komando.

b. Padi dan Kapas. 17 butir padi dan 8 buah kapas melambangkan semangat kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus serta sebagai lambang kemakmuran dan Keadilan sosial.



c. Jangkar. Menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan operasi di medan maritim baik sungai, rawa, dan laut.

d. Pisau Komando (3 uliran di gagang). Kemampuan operasi tempur dengan selalu memegang teguh 3 pasal Janji prajurit Komando dalam setiap tugasnya.

### Sekolah Para.

Sekolah Para Pusdiklatpassus adalah lembaga pendidikan militer yang berperan penting dalam mewujudkan kemampuan prajurit Kopassus. Keberadaan Sekolah Para Pusdiklatpassus memiliki peran strategis dalam menyiapkan prajurit Kopassus yang berkualitas dan siap untuk menjalankan tugas-tugas khusus yang memerlukan kemampuan luar biasa. Salah satu aspek penting dari keberadaan Sekolah Para Pusdiklatpassus adalah penyediaan pelatihan intensif dan terstruktur bagi prajurit Kopassus.

#### 1. Lambang dan Makna dari Sekolah Para.



a. Kedua Pangkal Sayap Kanan dan Kiri. Mampu melaksanakan penerjunan untuk tugas yang di embannya, masing-masing sayap memiliki 17 bulu (Tanggal kemerdekaan RI).

b. Jumlah Tali Payung Pada Kanopi. Jumlah tali payung kanopi memiliki 8 utas tali payung (Bulan kemerdekaan RI).

c. Jumlah Sayap Kecil Atas Dan Bawah. Jumlah bulu sayap kecil atas 4 bulu dan bawah 5 bulu (Tahun kemerdekaan RI).

d. Padi Kapas. Lambang sandang dan pangan bagi prajurit Linud (Kebutuhan pokok prajurit TNI AD).

e. Dua Bintang. Lambang kemuliaan dan utamaan bagi prajurit lintas udara dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh komando atas.

2. Jenis Pendidikan yang diselenggarakan di Sekolah Para Pusdiklatpassus Kopassus terdiri dari Para Dasar, Para Dewasa, Para Madya, Para Utama, kualifikasi Jump Master, Kualifikasi Pandu Udara, dan kualifikasi Free Fall, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Para Dasar.  
Digunakan oleh Pa, Ba dan Ta yang telah melaksanakan 7x terjun statik atau lebih.



b. Para Dewasa.  
Digunakan oleh Pa, Ba dan Ta yang telah melaksanakan 30x terjun statik atau lebih.



c. Para Madya.  
Digunakan oleh Pa, Ba dan Ta yang telah melaksanakan 60x terjun statik atau lebih.



d. Para Utama.  
Digunakan oleh Pa, Ba dan Ta yang melaksanakan 100x terjun statik atau lebih dan menunjukkan prestasi/jasa yang menonjol dalam keparaannya.



e. Kualifikasi Jump Master.  
Dipakai/digunakan oleh Pa dan Ba yang telah melaksakan 30x terjun dan lulus Dik Jump Master.



f. Kualifikasi Pandu Udara.  
Dipakai/digunakan oleh Pa, Ba dan Ta yang telah melaks 30x terjun dan lulus Dik Pandu Udara.



- g. Kualifikasi Free Fall. Dipakai/digunakan oleh Pa, Ba dan Ta yang telah melaks 60x terjun bebas atau lebih.



## Sekolah Sandi Yudha.

Pembentukan Sekolah Sandi Yudha tidak dapat dilepas dari proses sejarah, Pendidikan kemampuan Sandi Yudha yang pertama kali diselenggarakan bagi prajurit Baret Merah dilaksanakan pada tahun 1966.

1. Lambang dan makna Sekolah Sandi Yudha Pusdiklatpassus.



- a. Pisau Komando. Terhunus ke atas melambang kan ciri memiliki jiwa komando yang kokoh dalam

melaksanakan tugas sebagai prajurit Kopassus/ TNI AD pada umumnya.

- b. Seekor Burung Merpati. Dengan sayap terbuka melambangkan pengantar pesan atau caraka dimana yang sedang menggenggam sebuah buku yang melambangkan sarana untuk mengantarkan pesan dengan kecepatan, ketepatan dan tanpa terbaca oleh lawan.

- c. Sebuah Jangkar Warna Kuning. Yang melambangkan ketanggungan kemampuan yang bukan hanya di daratan saja akan tetapi kemampuan di Perairan juga.

- d. Sebuah Buku Hitam. Dengan isi lembaran putih dalam cengkraman seekor burung merpati yang mengandung makna bahwa Sekolah Sandi Yudha senantiasa menjunjung makna Penyampaian Pesan atau Tenaga Pendidik yang handal dengan tulisan tersebut dalam pengabdianya baik sebagai prajurit dalam tugas maupun kepribadiannya sebagai manusia adanya.

- e. Pita. Bertuliskan CIPTA RASA KARSA berwarna hitam yang berarti Ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia.

2. Macam Pendidikan Sekolah Sandi Yudha.

Sekolah Sandi Yudha adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengembangan daya pikir, kemampuan, serta keterampilan dasar dan lanjutan personel sebagai prajurit Sandi Yudha meliputi:

- a. Pendidikan Perwira Sandi Yudha Dasar.  
b. Pendidikan Bintara Sandi Yudha Dasar.  
c. Pendidikan Tamtama Sandi Yudha Dasar.

- c. Pendidikan Perwira Sandi Yudha Lanjutan.
- d. Pendidikan Bintara Sandi Yudha Lanjutan.
- e. Pendidikan Operasi Psikologi.
- f. Pendidikan Bintara Pelatih Sandi Yudha.

### Sekolah Spesialisasi.

Pelatihan spesialisasi ini dimulai dari tingkat dasar, kemudian berkembang menjadi lanjutan I (Madya), lanjutan II (Utama) dan selanjutnya dapat dikembangkan dengan ketentuan dan tuntutan tugas. Batas tingkatan ini berdasarkan kedalaman spesialisasi yang ilmu pengetahuan dan teknologi dihadapkan pada tuntutan tugas. Sampai dengan saat ini sekolah spesialisasi menaungi 6 spesialisasi dasar (Dakibu, Bakduk, Zidem, Peralatan, Kesehatan, Perhubungan) dan satu kemampuan dasar infiltrasi yaitu selam militer dasar.

#### 1. Lambang dan makna dari sekolah Spesialisasi



a. Padi Kapas. Melambangkan sebagai sandang dan pangan bagi prajurit Kopassus yang merupakan kebutuhan prajurit TNI AD Dengan Padi berjumlah 17 butir dan Kapas berjumlah 8 susun menggambarkan 17 Agustus.

b. Carabinner dan Figur Eight. Salah satu perlengkapan yang digunakan prajurit Kopassus dalam menempuh pendidikan Pendaki Serbu di sekolah Spesialisasi.

c. Petir. Salah satu simbol perhubungan dimana prajurit Kopassus setelah menempuh pendidikan Komando dilanjutkan dengan pendidikan Perhubungan dasar di sekolah Spesialisasi.

d. Benteng. Salah satu simbol zeni dimana prajurit Kopassus setelah menempuh pendidikan Komando dilanjutkan dengan pendidikan Zeni Demolisi dasar di sekolah Spesialisasi.

e. Granat. Salah satu perlengkapan yang digunakan prajurit Kopassus dalam menempuh pendidikan Peralatan Dasar di sekolah Spesialisasi.

f. Target dan Senapan Silang. Salah satu logo dalam kegiatan menembak dimana setelah prajurit kopassus menempuh pendidikan komando dilanjutkan pendidikan Penembak Runduk di sekolah Spesialisasi.

g. Orang Menyelam. Melambangkan kegiatan penyelaman dimana kualifikasi Selam Militer dasar prajurit Kopassus dilaksanakan disekolah spesialisasi.

#### 2. Jenis Pendidikan dan Brevet sekolah spesialisasi

a. Pendaki Serbu.



b. Penembak Runduk (Bakduk).



c. Zeni Demolisi.



d. Peralatan.



e. Perhubungan.



f. Kesehatan.



g. Selam Militer.



## Sekolah Raider.

Terbentuknya sekolah Raider Pusklatpassus Kopassus terinspirasi dari keberhasilan pasukan Raider di daerah penugasan operasi pada masa lalu. Atas prakarsa dari Bapak Kasad pada saat itu yaitu Jenderal TNI Riyamizard Riachudu pada tanggal 22 Mei 2003 digulirkan ke b i j a k s a n a n membentuk 10 Yonif Raider yang tersebar di 8 Kodam dan jajaran Kostrad yang diambil dari Satuan Pemukul (Yonif 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 323 dan 412).

Lambang dan makna Brevet Kualifikasi Raider

1. Sangkur terhunus bermata dua. melambangkan bahwa prajurit Raider

memiliki ketajaman dalam berfikir dan berolah yudha. Sehingga prajurit Raider selalu siap mengemban tugas sebagai pasukan terdepan.

2. Lintasan Kilat atau Petir. Melambangkan bahwa prajurit Raider adalah prajurit yang mampu bergerak dan bertindak dengan cepat dan senyap di segala bentuk medan dalam pertempuran.

3. Api Yang Membara. Melambangkan jiwa yang semangat berkobar-kobar, melukiskan bahwa setiap prajurit Raider memiliki mental yang tangguh, tidak pernah menyerah, demi kepentingan tugas dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## Sekolah Pertempuran Khusus.

“CATUR KSATRIA YUDHA” memiliki makna Sekolah penggemblengan prajurit Kopassus yang berjiwa ksatria dan memiliki 4 kemampuan dalam pertempuran khusus yaitu di Perkotaan, Hutan, Pengamanan VVIP dan Anti Teror. Sesanti ini merupakan suatu wadah dari gabungan empat sekolah yang dijadikan satu menjadi satu satuan Sekolah yang diberinama Sekolah Pertempuran Khusus (Sepursus).



**1. Lambang dan makna dari Sekolah Pertempuran Khusus**

a. Sayap yang terbentang dan berwarna hitam memiliki arti prajurit Anti Teror yang siap dengan cepat dan senyap menghancurkan musuh dan menyelesaikan sasaran dalam upaya penganggulangan ancaman teror.

b. Perisai dengan dasar warna merah putih memiliki arti bahwa prajurit yang di didik di Sekolah Pertempuran Khusus memiliki jati diri sebagai seorang prajurit yang siap sebagai pengamanan dan mempertahankan personel pejabat dari segala bentuk ancaman dan gangguan serta memiliki kemampuan pertempuran kota.

c. Kepala Harimau melambangkan keteguhan, kerahasiaan dan siap bertempur bagi prajurit Pertempuran Hutan seperti seekor harimau yang tangguh di hutan rimba.

d. Pisau Komando dan Buku Petir melambangkan Prajurit Komando yang menempuh pendidikan di Sekolah Pertempuran Khusus senantiasa berpegang teguh pada Janji Prajurit Komandan memiliki bekal pengetahuan yang luas, sehingga mampu berdiri tegak penuh wibawa, siap membela kebenaran dan keadilan serta siap menghancurkan unsur-unsur yang berusaha merongrong keselamatan bangsa dan negara.

e. Pita yang bertuliskan "CATUR KSATRIA YUDHA" mengandung arti yaitu prajurit Kopassus yang berjiwa ksatria dan memiliki 4 kemampuan dalam Pertempuran Khusus yaitu di Perkotaan, Hutan, Pengamanan VVIP dan menanggulangi Aksi Terorisme.

**2. Gambar Brevet / Tanda Kualifikasi Sekolah Pertempuran Khusus**

a. Pertempuran Hutan



b. VVIP



c. Anti Teror



d. Purkota





## PERAN SATGAS YONIF PR 305/TENGGORAK DALAM MENJAGA STABILITAS DAN KEAMANAN DI WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA

OLEH : LETDA INF MUHAMMAD KEVIN WIRASENA, S.TR (HAN)  
(PASI OPS SATGAS YONIF PR 305/TENGGORAK/17/  
KOSTRAD)

**T**NI manunggal bersama rakyat merupakan salah satu jargon yang selalu digaungkan oleh TNI. Kalimat ini sejatinya mengandung makna yang begitu mendalam dimana dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah kedekatan TNI bersama masyarakat. Hal inilah yang dijadikan pedoman oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak selama kurang lebih 10 bulan menjalankan tugas suci di Kabupaten Intan Jaya. Melalui proses pendekatan kemanusiaan yang disertai dengan kegiatan tempur secara simultan dan didukung dengan kegiatan intelijen terbatas, Satgas Yonif 305/Tengkorak berhasil menciptakan situasi Kabupaten

Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah yang aman dan juga damai.

### Penyiapan Satgas Yonif 305/Tengkorak.

Konflik di Papua yang terjadi hingga saat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa keinginan bertempur 'lawan' (KSTP, Kelompok Separatis Teroris Papua) tetap hidup meskipun konflik di wilayah Papua telah berlangsung selama beberapa dekade. Alih-alih melemah, konflik yang berlarut ini justru telah meningkatkan kemampuan dan kekuatan KSTP karena mereka memiliki ruang dan waktu yang cukup leluasa untuk mempelajari karakteristik wilayah, membandingkan, serta mempelajari beragam pola bertempur Satuan TNI AD yang bertugas di Papua. Untuk menghadapi ancaman tersebut maka Satuan yang digelar tentunya harus mampu melaksanakan

tugas dengan baik sehingga stabilitas keamanan di wilayah Papua dapat terjaga.

Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI nomor TR/615/2022 tanggal 16 Agustus 2022, Satgas Yonif 305/17/1 Kostrad mendapatkan perintah merotasi Satgas Yonif 328/17/1 Kostrad untuk melaksanakan penugasan operasi sebagai Satgas Satuan Organik di Wilayah Provinsi Papua. Sebagai Satgas satuan organik, Yonif 305/Tengkorak mendapatkan tugas pokok dari Komando Atas untuk menjalankan Tugas Kodim dan Koramil melalui kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Walaupun tugas pokok yang diberikan oleh Komando Atas menitikberatkan pada kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial, namun Letkol Inf Ardiansyah selaku Danyonif 305/Tengkorak tetap menyiapkan seluruh pasukannya untuk selalu siap terhadap setiap kemungkinan yang ada. Untuk itulah persiapan Satgas yang dilaksanakan oleh Yonif 305/Tengkorak tidak hanya menitikberatkan pada materi latihan sesuai dengan direktif dan juga proglatsiops, namun juga disisipkan didalamnya beberapa inovasi kegiatan dan latihan yang memang tujuannya untuk membiasakan prajurit agar selalu siap terhadap setiap kemungkinan yang bisa terjadi di daerah operasi.



Adapun beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak selama proses persiapan satgas adalah sebagai berikut :

**a. Inovasi selama berada di *Homebase* :**

1. Lomba khotbah keagamaan bagi personel Nasrani.
2. Lomba pemberian pertolongan pertama dan evakuasi korban antar Tim Tempur Satgas
3. Lomba mengenal DPO dan Tokoh KSTP
4. Lomba bongkar pasang senjata sesuai dengan indeks senjata perorangan.
5. Lomba memasak antar Pos.
6. Lomba mengenal anggota Tim.
7. Guyub Tengkorak.

**b. Inovasi selama berada di daerah latihan :**

1. Membentuk Timsus setiap Pos yang bergerak atas perintah Dansatgas untuk mengganggu atau menyerang Pos lain. (pada saat Lattiskipur dan Lat Pratusas)
2. Melaksanakan uji pertahanan Pos.
3. Melaksanakan Latihan Menembak Perasaan.
4. Melaksanakan aplikasi kegiatan Binter secara langsung.

Selain menjalankan inovasi-inovasi tersebut, dalam melaksanakan persiapan Satgas, Yonif 305/Tengkorak tidak hanya membangun kesiapan prajurit tetapi juga membangun kesiapan garis belakang. Penyiapan garis belakang menjadi hal yang tak kalah penting karena garis belakang merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi ketahanan mental prajurit di daerah operasi. Penyiapan garis belakang tentunya memiliki efek yang signifikan terhadap kesiapan prajurit dalam menjalankan tugasnya baik selama di homebase maupun di daerah operasi. Untuk itu, selama tahap persiapan satgas inilah Yonif 305/Tengkorak mencoba untuk menyiapkan seluruh kesiapan garis belakang yang ada di satuan.



Yang pertama adalah penyiapan pangkalan. Pangkalan merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus disiapkan dalam rangka penyiapan tugas operasi. Dari pangkalan inilah para prajurit mengawasi keluarga, membangun keharmonisan, hingga membesarkan anak-anaknya. Oleh karenanya, pangkalan harus benar-benar aman, nyaman dan memiliki atmosfer yang bersahabat. Fasilitas-fasilitas yang ada di satuan harus dibangun dan dipelihara untuk digunakan secara bersama-sama baik prajurit, istri, dan anak-anaknya. Selain itu, fasilitas hiburan anak, fasilitas pendidikan anak, serta penerangan pangkalan menjadi fokus untuk ditambah dan pelihara, agar anak-anak dan keluarga prajurit merasa senang dan nyaman berada di lingkungan asrama.

Yang kedua adalah kesiapan peran persatuan istri prajurit (Persit). Peran persatuan istri prajurit (Persit) juga tak kalah penting, karena pada dasarnya persatuan istri prajurit (Persit) dibentuk sebagai wahana untuk menjalin silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan antar istri prajurit serta sebagai sarana komunikasi guna memelihara moral para istri prajurit dikala suaminya pergi menjalankan tugas operasi. Kedua kesiapan ini apabila berhasil disiapkan dengan baik, secara tidak disadari dapat menstimulus kesejahteraan moral dan psikologis keluarga, sehingga dapat mendukung keberhasilan tugas operasi.

## Pelaksanaan Satgas Yonif 305/Tengkorak



Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu kabupaten yang dapat dikategorikan sebagai salah satu daerah hitam di wilayah Papua. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Kabupaten Intan Jaya terkenal merupakan salah satu basis terbesar KSTP, dimana terdapat 4 kelompok besar KSTP yang berbasis di wilayah Kabupaten Intan Jaya yaitu Kodap VIII/Kemabu pimpinan Sabinus Waker, Kodap VIII/Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya, Kodap VII/Migani pimpinan Damianus Nagapa dan juga Batalyon Ndullamo Kodap III/Ndugama pimpinan Daniel Aibon Kogoya. Tak hanya itu, kondisi pemerintah daerah yang tidak berjalan dengan baik, dimana kantor-kantor pemerintahan tidak berfungsi dan juga pejabat-pejabat pemerintah daerah tidak pernah ada di tempat, seakan semakin membuat situasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya tidak pernah stabil.

Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah yang begitu rentan terjadi konflik.



Pada awal mula kedatangannya di Kabupaten Intan Jaya, tentunya banyak kendala yang dihadapi oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak mulai dari konflik sosial yang terjadi masyarakat, konflik masyarakat dengan KSTP, ketidakpercayaan masyarakat baik terhadap pemerintah dan aparat keamanan dan berbagai kendala lainnya. Namun tentunya hal tersebut tak membuat Satgas Yonif 305/Tengkorak menjadi gentar. Selama 10 bulan bertugas di Intan Jaya, kendala-kendala yang ada berhasil dimanfaatkan dan diolah menjadi sebuah peluang dan juga strategi oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak. Dan terbukti melalui pendekatan kemanusiaan yang dijalankan (Program Binter dan Komunikasi Sosial) yang diimbangi dengan kegiatan tempur dan kegiatan intelijen terbatas, Satgas Yonif 305/Tengkorak berhasil memenangkan hati dan pikiran masyarakat serta berhasil menciptakan kondisi Kabupaten Intan Jaya yang aman dan juga damai. Adapun beberapa Program unggulan yang dijalankan oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak selama bertugas di Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Program borong hasil bumi.
- b. Program pembuatan fasilitas hanpangan (Fasilitas lahan pertanian, dan fasilitas budidaya ternak babi, ayam, & lele).
- c. Program Selasa dan Jumat berbagi.
- d. Program patroli special.
- e. Program pembangunan Gereja

Bazemba.

- f. Program pembuatan kursi Gereja Bazemba.
- g. Program renovasi makam kepala suku besar Oktavianus Sondegau.
- h. Program pembuatan Komplek Ceria Intan Jaya.
- i. Program TNI-AD Manunggal Air (8 Titik).
- j. Program Pemasangan Lampu Solar Cell (106 Titik Pemasangan Lampu).

### **Penyerahan senjata secara sukarela oleh tokoh KSTP.**

Selama 10 bulan bertugas di Kabupaten Intan Jaya, begitu banyak juga kisah dan pengalaman menarik yang diperoleh oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak, salah satu kisah yang menarik adalah kisah penyerahan senjata oleh tokoh KSTP secara sukarela. Dengan pola pendekatan kemanusiaan yang diimbangi dengan kegiatan tempur dan kegiatan intelijen secara terbatas, Satgas Yonif 305/Tengkorak berhasil mendapatkan senjata dan juga munisi secara sukarela dari tokoh-tokoh KSTP yang ada di wilayah



Kabupaten Intan Jaya.

Konflik internal yang terjadi antara 2 Kelompok KSTP (Kodap VIII/Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya dan Kodap VIII/Kemabu pimpinan Sabinus Waker) berhasil dimanfaatkan oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak sebagai ajang adu domba dan juga ajang pemanfaatan sehingga kedua belah pihak dengan sukarela mau menyerahkan beberapa pucuk senjata api organiknya dan juga senjata non organiknya kepada Satgas.

Selain memanfaatkan konflik antara 2 Kelompok KSTP tersebut, ternyata program-program teritorial yang dijalankan oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak juga memberikan dampak yang begitu luar biasa. Program-program teritorial yang dijalankan oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak terbukti mampu meluluhkan hati dari beberapa tokoh KSTP. Dimana sebagai bentuk rasa terima kasihnya, beberapa tokoh KSTP dengan sukarela menyerahkan senjatanya kepada Satgas Yonif 305/Tengkorak. Adapun beberapa senjata dan munisi yang berhasil diraih oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak secara sukarela adalah sebagai berikut :

**a. Senjata:**

1. 1 Pucuk Smith dan wesson 34-1 kit gun. 22 LR 2 BBL blued Revolver MFG 1969).
2. 1 pucuk (Makarov 9 MM).
3. 1 pucuk (modifikasi dari shoot gun menjadi kal 5,56 MM).
4. 1 pucuk (M4, Kal 5,56 MM).
5. 1 pucuk (revolver rakitan mu kal.9 MM).
6. 1 pucuk (revolver jenis Smith and Wesson 357 Magnum).
7. 1 pucuk (revolver jenis Smith dan Wesson Model 22).
8. 1 pucuk (Walther 4,5 MM Air Gun).

**b. Munisi:**

1. Munisi tajam kal. 5,56 mm: 2 butir.
2. Munisi tajam kal. 9 mm: 11 butir.
3. Munisi karet kal. 9 mm: 1 butir.
4. Munisi tajam kal. 2,2 mm: 7 butir.

**Masyarakat Meminta Satgas Untuk Tetap Berada Di Intan Jaya.**

Perjalanan Satgas Yonif 305/Tengkorak selama bertugas di Kabupaten Intan Jaya seakan ditutup dengan penuh haru. Masyarakat seakan tak rela melepas kepergian Satgas Yonif 305/Tengkorak untuk meninggalkan Kabupaten Intan Jaya. Dalam acara-acara perpisahan yang dilaksanakan oleh Satgas Yonif 305/Tengkorak di Pos-pos Satgasnya, hampir seluruh masyarakat yang hadir

menyatakan keberatannya jika Satgas Yonif 305/Tengkorak harus meninggalkan Kabupaten Intan Jaya. Masyarakat ingin Letkol Inf Ardiansyah bersama dengan pasukannya untuk tetap tinggal bersama



“Selama ini, pimpinan Raja Aibon (sebutan untuk Letkol Inf Ardiansyah selama bertugas di Intan Jaya), di saat perang, kita masyarakat banyak yang diselamatkan, sehingga apabila pengganti nanti datang, kalau tidak bisa rangkul masyarakat kita tidak mau. Kami mau Raja Aibon itu tetap bersama kami. Bapak Raja Aibon dengan jajaran itu tidak boleh ke kampung, harus tinggal sama-sama masyarakat di sini. Itu yang kami minta”, kata Mama Dorci Wandagau, salah satu tokoh perempuan dari Kampung Sambili.

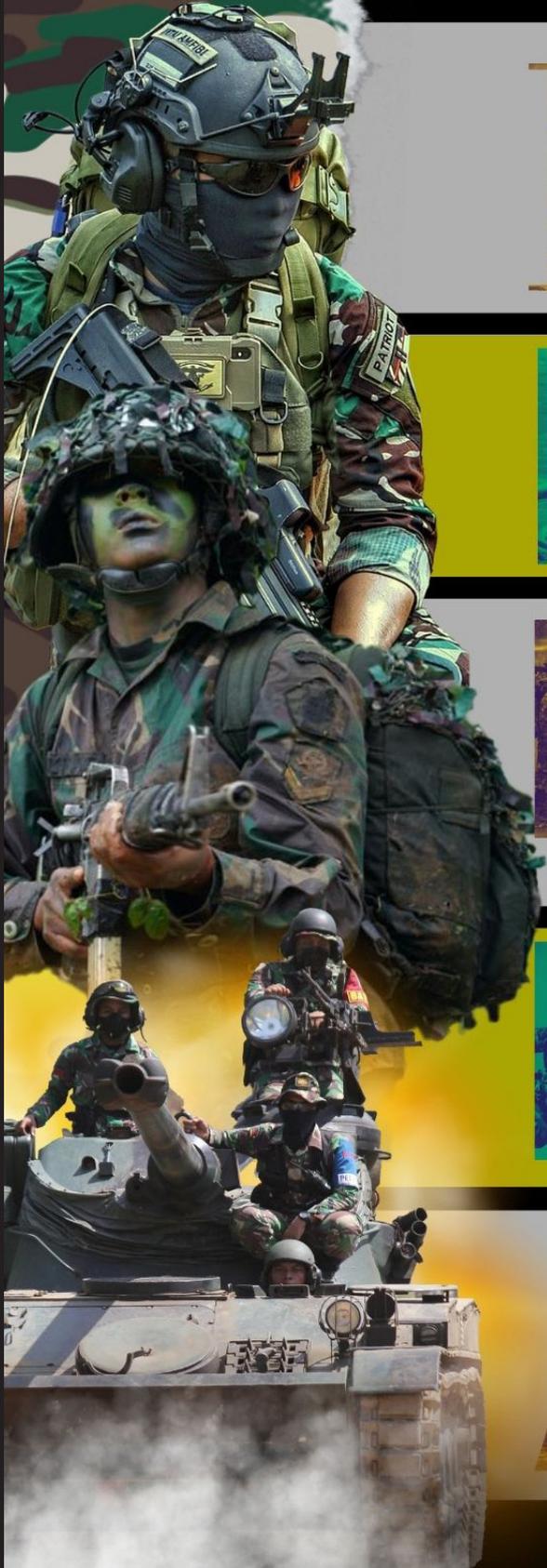
Tidak hanya warga Kampung Sambili yang menolak Pasukan Tengkorak untuk kembali ke Karawang. Tetapi masyarakat dari beberapa kampung lain di Intan Jaya, seperti Kampung Amaesiga, Kampung Mamba, Kampung Wandoga, dan Kampung Bilogai juga menolak Letkol Inf Ardiansyah dan Pasukan Tengkorak untuk pergi meninggalkan Kabupaten Intan Jaya. Tak sedikit pula masyarakat yang meneteskan air mata seakan tak rela melihat Tentara yang selama ini selalu hadir bersama mereka, harus kembali ke kampung halamannya. Sungguh suatu pemandangan yang mengharukan. Dan hal ini tentunya bukan tanpa alasan, karena memang selama 10 bulan bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Satgas Yonif 305/Tengkorak telah banyak berjasa membangkitkan kembali kehidupan masyarakat yang selama beberapa tahun terakhir sempat terganggu akibat teror gangguan keamanan yang dilancarkan gerombolan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP).



**PENPAS**  
**PENERANGAN PASUKAN**  
**TNI ANGKATAN DARAT**



**TNI AD**  
**YANG**  
**PRIMA**



**P**

## PROFESIONAL

- *Well Trained* atau dilatih dengan baik.
- *Well Equipped* atau dilengkapi dengan baik.
- *Well Organized* atau diorganisir dengan baik.
- *Well Paid* atau dibiayai dengan baik.

**R**

## RESPONSIF

- Potensi konflik di Laut Cina Selatan.
- Konflik vertikal seperti masalah di Papua.
- Pesta Demokrasi Pemilu 2024.
- Ancaman konflik horizontal.
- Potensi bencana alam.

**I**

## INTEGRATIF

- Alutsista TNI AD dalam sistem pertahanan terpadu melalui *Network Centric Warfare System (NCWS)*.
- Satuan Siber TNI AD dalam mengantisipasi perang multidimensional di dunia maya.
- TNI AD bersama Polri dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam menghadapi berbagai situasi kontinjensi.

**M**

## MODERN

- Pemanfaatan kemajuan teknologi.
- Kemandirian Alutsista.
- Pengadaan Alutsista, perlengkapan dan peralatan

**A**

## ADAPTIF

- Mendorong peningkatan Pembinaan Teritorial.
- Meningkatkan kemampuan TNI dalam mengidentifikasi setiap ancaman.
- Menjalankan peran sebagai aparatur negara.

